



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

LAPORAN KEUANGAN *UNAUDITED* BAGIAN ANGGARAN 055

SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN 2024



BAGIAN ANGGARAN 055

LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2024
(Unaudited)

Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian PPN/ Bappenas. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juli 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional

Suharso Monoarfa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	2
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	3
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	5
II. NERACA.....	6
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	8
IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	9
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	10
A. PENJELASAN UMUM.....	10
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	24
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	59
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	101
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	120
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Satker Kementerian PPN/Bappenas TA 2024	13
Tabel 2	Penggolongan Kualitas Piutang.....	17
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	21
Tabel 4	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	22
Tabel 5	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja per 30 Juni 2024.....	24
Tabel 6	Rincian Anggaran per Program per 30 Juni 2024	24
Tabel 7	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2024.....	25
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	26
Tabel 9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024	27
Tabel 10	Rincian Belanja Berdasarkan Program per 30 Juni 2024.....	29
Tabel 11	Rincian Belanja Berdasarkan Bagian Anggaran per 30 Juni 2024.....	29
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:.....	29
Tabel 13	Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri Kas (Termasuk Belum Proses SPHL) per 30 Juni 2024	30
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	31
Tabel 15	Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	32
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	33
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	35
Tabel 18	Kesalahan MAK Belanja <i>Ekstrakomtable</i> dengan MAK Belanja Modal	36
Tabel 19	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	36
Tabel 20	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.	37
Tabel 21	Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024.....	44
Tabel 22	Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	59
Tabel 23	Rincian Pembagian Uang Persediaan TA 2024.....	60
Tabel 24	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	61
Tabel 25	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	62
Tabel 26	Rincian Data Karyasiswa.....	62
Tabel 27	Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan	

31 Desember 2023.....	63
Tabel 28 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	64
Tabel 29 Perbandingan Rincian Penyisihan Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	64
Tabel 30 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2024	65
Tabel 31 Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	65
Tabel 32 Perbandingan Piutang Tidak Tertagih-BL TGR/TGR per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	66
Tabel 33 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-BL TGR/TGR per 30 Juni 2024	66
Tabel 34 Perbandingan Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	67
Tabel 35 Mutasi Persediaan.....	67
Tabel 36 Saldo Persediaan pada Satuan Kerja	68
Tabel 37 Mutasi Barang Konsumsi	68
Tabel 38 Mutasi Bahan untuk Pemeliharaan.....	70
Tabel 39 Mutasi Suku Cadang	70
Tabel 40 Mutasi Pita Cukai, Materai dan Leges	71
Tabel 41 Mutasi Tanah dan Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	72
Tabel 42 Mutasi Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	72
Tabel 43 Mutasi Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	73
Tabel 44 Mutasi Aset Lain-lain untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat.....	73
Tabel 45 Mutasi Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	75
Tabel 46 Mutasi Bahan Baku	75
Tabel 47 Mutasi Persediaan Lainnya.....	76
Tabel 48 Perbandingan Tanah per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	77
Tabel 49 Mutasi Aset Tetap Berupa Tanah	77
Tabel 50 Rincian Saldo Tanah per 30 Juni 2024.....	78
Tabel 51 Perbandingan Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	80
Tabel 52 Mutasi Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin.....	81
Tabel 53 Perbandingan Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	83
Tabel 54 Mutasi Transaksi Terhadap Gedung dan Bangunan	83
Tabel 55 Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023...	85
Tabel 56 Mutasi Transaksi Terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85
Tabel 57 Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	86

Tabel 58 Rincian Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024.....	86
Tabel 59 Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya	86
Tabel 60 Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	88
Tabel 61 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	88
Tabel 62 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024	89
Tabel 63 Perbandingan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	90
Tabel 64 Perbandingan Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	91
Tabel 65 Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024	91
Tabel 66 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud	92
Tabel 67 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	93
Tabel 68 Perbandingan Aset Lain-Lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	94
Tabel 69 Rincian Aset Lain-lain per 30 Juni 2024	94
Tabel 70 Mutasi Aset Lain-lain.....	95
Tabel 71 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024	96
Tabel 72 Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	96
Tabel 73 Rincian Kegiatan Hibah dan Nilai yang belum disahkan per 30 Juni 2024	97
Tabel 74 Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	98
Tabel 75 Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	99
Tabel 76 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	99
Tabel 77 Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	101
Tabel 78 Perbandingan PNPB Lainnya pada LO dan LRA per 30 Juni 2024.....	102
Tabel 79 Selisih nilai PNPB Lainnya pada LO dan LRA per 30 Juni 2024.....	102
Tabel 80 Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	103
Tabel 81 Selisih Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA per 30 Juni 2024.....	104
Tabel 82 Selisih Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA	104
Tabel 83 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	105
Tabel 84 Perbandingan Rincian Beban Persediaan pada LO dan LRA per 30 Juni 2024	105
Tabel 85 Selisih nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA per 30 Juni 2024.....	106
Tabel 86 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	107
Tabel 87 Perbandingan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 30 Juni 2024	108

Tabel 88 Selisih nilai Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 30 Juni 2024.....	109
Tabel 89 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023....	110
Tabel 90 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 30 Juni 2024 ..	111
Tabel 91 Selisih Nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 30 Juni 2024.....	111
Tabel 92 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	112
Tabel 93 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 30 Juni 2024	113
Tabel 94 Selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 30 Juni 2024.....	113
Tabel 95 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.....	114
Tabel 96 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	115
Tabel 97 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	115
Tabel 98 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.....	116
Tabel 99 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dan LRA per 30 Juni 2024	116
Tabel 100 Realisasi Beban Pelepasan Aset Non Lancar	116
Tabel 101 Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar antara LO dan LRA per 30 Juni 2024.....	117
Tabel 102 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023	117
Tabel 103 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 30 Juni 2024	118
Tabel 104 Selisih Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	118
Tabel 105 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	119
Tabel 106 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya antara LO dan LRA per 30 Juni 2024	119
Tabel 107 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....	120
Tabel 108 Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per Satker	121
Tabel 109 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.....	122
Tabel 110 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	122
Tabel 111 Rincian Koreksi Lain-Lain Berdasarkan Satker	122
Tabel 112 Transaksi Antar Entitas	123
Tabel 113 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per Satker	124
Tabel 114 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker.....	125

Tabel 115 Rincian Transfer Keluar per Satker	125
Tabel 116 Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker	126
Tabel 117 Daftar Hibah Langsung Sudah Disahkan per 30 Juni 2024.....	127
Tabel 118 Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per Satker	127

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023.....	28
----------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

I. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

1. Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran;
2. Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas;
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja;
4. Daftar Realisasi Belanja Hibah sudah disahkan dan belum disahkan;
5. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*);
6. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima;
7. Daftar Piutang Bukan Pajak;
8. Daftar Rincian Persediaan;
9. Laporan Barang Milik Negara;
10. Daftar Barang Milik Negara Rusak Berat;
11. Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga;
12. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka;
13. Daftar Pinjaman dan Hibah;
14. Daftar Rekening Pemerintah dan Rekening Lainnya;
15. Neraca Percobaan;
16. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan;
17. Daftar Realisasi Satuan Kerja Pusat;
18. Daftar Realisasi Dana Dekonsentrasi;
19. Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK Atas LKKL TA 2022;
20. Rencana Tindak Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK Atas LKKL TA 2022;
21. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Bagian Satker;
22. Pernyataan Tanggung Jawab Unit Badan Lainnya Bagian Satker;
23. Daftar Tuntutan Hukum Pemerintah;
24. Daftar Barang Milik Negara Hilang.


PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk Tahun Anggaran 2024 Bagian Anggaran 055 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 29 Juli 2024

 BAPPENAS <small>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</small>	Ditandatangani secara elektronik oleh:
	INSPEKTUR UTAMA
	Trisacti Wahyuni



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Juli 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Suharso Monoarfa

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.364.982.261,00 atau mencapai 248% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp954.737.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp691.600.950.237,00 atau mencapai 32% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.166.022.013.000,00.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset pada 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.549.231.459.497,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp44.177.366.857,00; Aset Tetap (*Netto*) sebesar Rp1.865.223.271.299,00; Piutang Jangka Panjang (*Netto*) sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya (*Netto*) sebesar Rp639.830.821.341,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp85.929.277.892,00 dan Rp2.463.302.181.605,00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp82.097.852,00 sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar

Rp1.075.883.669.649,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp1.075.801.571.797,00).

Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.714.071.760,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp1.074.087.500.037,00).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp2.545.577.515.239,00. Mutasi selama tahun anggaran 2024 terdiri dari Defisit-LO sebesar (Rp1.074.087.500.037,00), Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp2.229.870,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp991.809.936.533,00. Sehingga Ekuitas per 30 Juni 2024 adalah senilai Rp2.463.302.181.605,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2024		% thd Angg	30 Juni 2023
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	954.737.000	2.364.982.261	248	3.362.669.538
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		954.737.000	2.364.982.261	248	3.362.669.538
JUMLAH PENDAPATAN		954.737.000	2.364.982.261	248	3.362.669.538
BELANJA					
Belanja Pemerintah Pusat	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	174.467.635.000	116.251.288.227	67	83.760.666.063
Belanja Barang	B.2.2	1.795.777.682.000	567.889.616.752	32	473.684.890.533
Belanja Modal	B.2.3	195.776.696.000	7.460.045.258	4	15.430.952.736
JUMLAH BELANJA		2.166.022.013.000	691.600.950.237	32	572.876.509.332

Jakarta, Juli 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional

Suharso Monoarfa

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS NERACA PER 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	6.205.590.320	84.294.315
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	17.198.719.194	5.974.233.928
Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>)	C.3	14.322.719.747	14.322.719.747
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	-	-
Piutang PNPB	C.5	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - BL TGR/TGR	C.8	-	-
Persediaan	C.9	6.450.337.596	5.351.083.434
Jumlah Aset Lancar		44.177.366.857	25.732.331.424
ASET TETAP			
Tanah	C.10	1.541.450.676.000	1.541.450.676.000
Peralatan dan Mesin	C.11	596.213.399.344	589.235.925.861
Peralatan dan Mesin Belum Diregister		-	-
Gedung dan Bangunan	C.12	170.720.539.389	168.981.619.282
Gedung dan Bangunan Belum Diregister		-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	15.101.617.672	15.101.617.672
Aset Tetap Lainnya	C.14	106.714.670.717	106.635.470.717
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	C.15	2.094.938.300	2.094.938.300
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(567.072.570.123)	(530.318.848.347)
Aset Tetap yang Belum Diregister		-	-
Jumlah Aset Tetap		1.865.223.271.299	1.893.181.399.485

A.NERACA

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR)	C.17	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.18	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak ketiga	C.19	490.209.375.000	490.209.375.000
Aset Tak Berwujud	C.20	126.571.852.362	126.559.710.365
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.22	-	20.068.813.422
Aset Lain lain	C.23	65.360.312.237	65.360.312.237
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(42.310.718.258)	(37.561.500.283)
Jumlah Aset Lainnya		639.830.821.341	664.636.710.741
JUMLAH ASET		2.549.231.459.497	2.583.550.441.650
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	45.745.271.219	37.784.214.832
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	7.846.707.102	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.27	25.997.869.040	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.28	130.709.323	104.417.264
Uang Muka dari KPPN	C.29	6.205.590.320	84.294.315
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.30	3.130.888	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		85.929.277.892	37.972.926.411
JUMLAH KEWAJIBAN		85.929.277.892	37.972.926.411
EKUITAS			
Ekuitas	C.32	2.463.302.181.605	2.545.577.515.239
JUMLAH EKUITAS		2.463.302.181.605	2.545.577.515.239
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.549.231.459.497	2.583.550.441.650

Jakarta, Juli 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional

Suharso Monoarfa

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	82.097.852	80.100.501
JUMLAH PENDAPATAN		82.097.852	80.100.501
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	128.376.606.062	92.706.813.962
Beban Persediaan	D.3	1.295.561.904	2.275.575.941
Beban Barang dan Jasa	D.4	740.534.147.345	672.909.104.451
Beban Pemeliharaan	D.5	14.856.465.238	16.297.561.195
Beban Perjalanan Dinas	D.6	148.697.966.901	154.485.209.560
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	2.314.000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	42.120.608.199	48.651.538.363
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	-	-
JUMLAH BEBAN		1.075.883.669.649	987.325.803.472
SURPLUS (DEFSIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.075.801.571.797)	(987.245.702.971)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFSIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	258.195.000	166.888.888
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	177.201.926
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		258.195.000	(10.313.038)
SURPLUS/(DEFSIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	4.546.644.888	1.718.563.082
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	3.090.768.128	408.564
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.455.876.760	1.718.154.518
SURPLUS/DEFSIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.714.071.760	1.707.841.480
SURPLUS/DEFSIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.074.087.500.037)	(985.537.861.491)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.14	-	-
SURPLUS/DEFSIT LO		(1.074.087.500.037)	(985.537.861.491)

Jakarta, Juli 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional

Suharso Monoarfa

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI 2024
DAN 30 JUNI 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
EKUITAS AWAL	E.1	2.545.577.515.239	2.570.191.931.718
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.074.087.500.037)	(985.537.861.491)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	2.229.870	(155.164.943.773)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	-
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.3.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.5	2.229.870	21.846.464
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	991.809.936.533	830.351.071.254
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(82.275.333.634)	(155.164.943.773)
EKUITAS AKHIR	E.6	2.463.302.181.605	2.415.026.987.945

Jakarta, Juli 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional

Suharso Monoarfa

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil &
Kebijakan
Teknis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunannasional;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
3. Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/ Daerah;
4. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara;
5. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
6. Pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
7. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
8. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber- sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
10. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Bappenas;
11. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas; dan
12. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Bappenas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 03 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/ Bappenas, dalam melaksanakan tugasnya Menteri

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PPN/Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Staf Ahli, Inspektorat Utama, dan Deputi yang masing-masing membidangi bidang-bidang tertentu, serta Pusat.

Susunan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
2. Deputi Bidang Ekonomi;
3. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
11. Inspektorat Utama;
12. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
13. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
15. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
16. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
17. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
18. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
19. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian PPN/Bappenas.

Jumlah satuan kerja (satker) aktif di lingkup Kementerian PPN/Bappenas per 30 Juni 2024 berdasarkan data di aplikasi SAKTI

adalah sejumlah 36 Satker. Rekapitulasi satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Daftar Satker Kementerian PPN/Bappenas TA 2024

No.	Satuan Kerja
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas
2	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (MWA ICCTF)
3	Majelis Wali Amanat Millenium Challenge Account Indonesia II (MWA MCAI II)
4	Bappeda Provinsi Jawa Barat
5	Bappeda Provinsi Jawa Tengah
6	Bappeda Provinsi DIY
7	Bappeda Provinsi Jawa Timur
8	Bappeda Provinsi Aceh
9	Bappeda Provinsi Sumatera Utara
10	Bappeda Provinsi Sumatera Barat
11	Bappeda Provinsi Riau
12	Bappeda Provinsi Jambi
13	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
14	Bappeda Provinsi Lampung
15	Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
16	Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
17	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
18	Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
19	Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
20	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
21	Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
22	Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
23	Bappeda Provinsi Maluku
24	Bappeda Provinsi Bali
25	Bappeda Provinsi NTB
26	Bappeda Provinsi NTT
27	Bappeda Provinsi Bengkulu
28	Bappeda Provinsi Maluku Utara
29	Bappeda Provinsi Banten
30	Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
31	Bappeda Provinsi Gorontalo
32	Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
33	Bappeda Provinsi Papua Barat
34	Bappeda Provinsi Sulawesi Barat
35	Bappeda Provinsi Kalimantan Utara
36	Bappeda Provinsi Papua

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian PPN/Bappenas menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian PPN/ Bappenas adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan Jasa Giro diakui pada saat terbitnya rekening koran per akhir bulan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN)
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CALK.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban Hibah diakui pada saat resume tagihan (SP2HL).

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - o Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - o Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - o Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan sebagai berikut:

Tabel 2 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - o harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - o Pengeluaran untuk per satuan peralatan, mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - o Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - o Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan

penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017- 2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.

- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi

lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusunan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja tersaji sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	954.737.000
Jumlah Pendapatan	-	954.737.000
Belanja		
Belanja Pegawai	174.467.635.000	174.467.635.000
Belanja Barang	1.752.558.098.000	1.795.777.682.000
Belanja Modal	181.483.176.000	195.776.696.000
Jumlah Belanja	2.108.508.909.000	2.166.022.013.000

Perubahan anggaran berdasarkan program pada Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Anggaran per Program per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Program	30 Juni 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.487.904.699.000	1.545.417.803.000
Program Dukungan Manajemen	620.604.210.000	620.604.210.000
Jumlah	2.108.508.909.000	2.166.022.013.000

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Pendapatan
Rp2.364.982.261,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.364.982.261,00 sedangkan estimasi pendapatan adalah sebesar Rp954.737.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	% Real Ang.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	443.500.000	258.195.000	58,22
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	75.580.000	85.792.000	113,51
Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)	435.657.000	-	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	22.587.911	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	87.015.335	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.673.589.031	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	237.792.984	-
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	10.000	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	954.737.000	2.364.982.261	247,71

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	258.195.000	166.888.888	54,71
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	85.792.000	80.100.500	7,11
Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	22.587.911	-	100,00
Pendapatan Denda Lainnya	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	-	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	87.015.335	1.575.458.893	(94,48)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.673.589.031	1.514.710.495	10,49
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	237.792.984	15.012.840	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	10.000	1 999.900,00	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	10.497.921	-
Jumlah	2.364.982.261	3.362.669.538	-29,67

Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2024 antara lain berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS); Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu; Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu; Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu; dan Pendapatan Anggaran Lain-lain.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) utamanya disebabkan oleh kenaikan signifikan atas Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu karena adanya pengembalian dari penyedia pada Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kantor Gedung Madiun Lantai 6. Selain itu, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah juga mengalami peningkatan dikarenakan terdapat penerimaan atas pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Jalan dan Irigasi Komplek Bappenas sesuai Addendum Nomor 130D/ADD/01.05-BAPPENAS/11/2023.

Realisasi Belanja
Rp691.600.950.237,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Kementerian PPN/Bappenas per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp691.600.950.237,00 atau mencapai 31,93 persen dari anggaran belanja sebesar Rp2.166.022.013.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

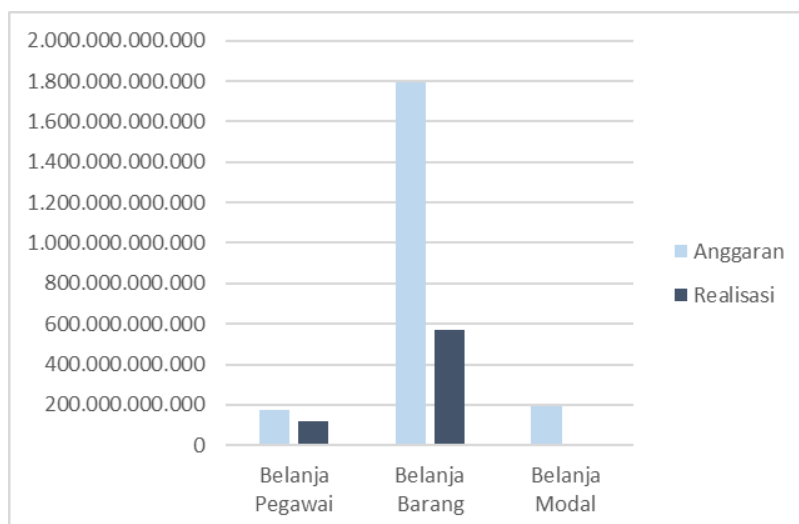
Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	174.467.635.000	116.259.041.932	66,64
Belanja Barang	1.795.777.682.000	567.989.893.652	31,63
Belanja Modal	195.776.696.000	7.460.045.258	3,81
Total Belanja Kotor	2.166.022.013.000	691.708.980.842	31,93
Pengembalian Belanja	-	-108.030.605	
Jumlah	2.166.022.013.000	691.600.950.237	31,93

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengembalian sebesar Rp108.030,605.00 terdiri dari pengembalian belanja pegawai sebesar Rp7.753.705,00 berupa pengembalian atas kelebihan pembulatan gaji PNS dan tunjangan umum PNS yang mengundurkan diri dan pengembalian belanja barang sebesar Rp100.276.900,00 berupa pengembalian atas sisa belanja perjalanan dinas.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024



Komposisi nilai anggaran dibandingkan nilai realisasi sebelum pengembalian pada belanja pegawai sebesar 66,64 persen, belanja barang sebesar 31,63 persen dan belanja modal sebesar 3,81 persen.

Realisasi belanja menurut sumber dana/program/kegiatan, eselon I/ wilayah/satker, jenis belanja/eselon I/akun dapat dilihat pada lampiran 3.

Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Program per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Program Perencanaan Bappenas	1.545.417.803.000	323.175.521.149	20,91
Program Dukungan Manajemen	620.604.210.000	368.533.459.693	59,38
Total	2.166.022.013.000	691.708.980.842	31,93
Pengembalian	-	-108.030.605	-
Jumlah	2.166.022.013.000	691.600.950.237	31,93

Tabel 11 Rincian Belanja Berdasarkan Bagian Anggaran per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
BA 055	2.166.022.013.000	691.708.980.842	31,93
Pengembalian	-	-108.030.605	-
Jumlah	2.166.022.013.000	691.600.950.237	31,93

Sedangkan perbandingan realisasi belanja per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	116.251.288.227	83.760.666.063	38,79
Belanja Barang	567.889.616.752	473.684.890.533	19,89
Belanja Modal	7.460.045.258	15.430.952.736	-51,66
Jumlah	691.600.950.237	572.876.509.332	20,72

Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 20,72 persen dibandingkan realisasi per 30 Juni 2023. Peningkatan terbanyak disumbang oleh kenaikan belanja pegawai yang disebabkan oleh penggunaan *rate* tunjangan kinerja terbaru pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari hingga Juni 2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain itu, terdapat penerimaan pegawai PPPK di 2024 sebanyak 328 Pegawai sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.010A/M.PPN/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan

Nomor KEP.013/M.PPN/03/2024 tanggal 29 Maret 2024.

Realisasi Belanja TA 2024 senilai Rp691.600.950.237,00 sudah termasuk didalamnya berupa realisasi belanja hibah langsung uang per 30 Juni 2024 yang belum proses SPHL senilai Rp5.972.499.637,00, yang terdiri dari:

1. Realisasi belanja atas tahun anggaran berjalan atas hibah UNICEF sebesar Rp4.531.834.142,00; dan
2. Realisasi belanja atas tahun anggaran berjalan atas hibah UNFPA sebesar Rp1.440.665.495,00.

Tabel 13 Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri Kas (Termasuk Belum Proses SPHL) per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Realisasi belanja hibah langsung uang :	
1. Terbit SPHL	-
2. Belum terbit SPHL	-
3. Belum proses SPHL	5.972.499.637
Jumlah	5.972.499.637

Rincian penjelasan dapat dilihat pada lampiran 2.

Dana hibah langsung luar negeri kas tersebut langsung disalurkan oleh Mitra Pembangunan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk membiayai suatu program/kegiatan/proyek tertentu melalui rekening unit pelaksana masing-masing program/kegiatan/proyek di Kementerian PPN/Bappenas. Apabila program/kegiatan/proyek telah selesai (*project closed*) dan masih terdapat sisa dana di rekening, maka dana tersebut disetor kembali ke Mitra Pembangunan.

Akuntabilitas pemanfaatan hibah tetap dapat dipertanggungjawabkan melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Mitra Pembangunan berdasarkan perjanjian hibah (*Grant Agreement*).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Mekanisme pencairan hibah langsung luar negeri kas diatur dalam:

1. *General Guidelines* dari Mitra Pembangunan menetapkan bahwa seluruh ketentuan pelaksanaan hibah mengacu kepada *guideline*;
2. *Memorandum of understanding* (MoU) Hibah antara Mitra Pembangunan dan Kementerian PPN/ Bappenas menetapkan bahwa penyaluran dana hibah langsung ke rekening yang disetujui oleh Mitra Pembangunan, bukan melalui rekening Kas Umum Negara.

Belanja Pegawai
Rp116.251.288.227,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp116.251.288.227,00 dan Rp83.760.666.063,00 atau terjadi peningkatan sebesar 38,79 persen. Hal ini utamanya disebabkan karena kenaikan belanja pegawai yang disebabkan oleh penggunaan *rate* tunjangan kinerja terbaru pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari hingga Juni 2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain itu, terdapat penerimaan pegawai PPPK di 2024 sebanyak 328 Pegawai sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.010A/M.PPN/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Nomor KEP.013/M.PPN/03/2024 tanggal 29 Maret 2024.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	41.892.543.662	38.415.237.779	9,05
Belanja Lembur	14.720.000	5.761.000	155,51
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	74.351.778.270	45.347.990.009	63,96
Total Belanja Pegawai	116.259.041.932	83.768.988.788	38,79
Pengembalian Belanja Pegawai	-7.753.705	-8.322.725	-6,84
Jumlah Belanja	116.251.288.227	83.760.666.063	38,79

Belanja Barang
Rp567.889.616.752,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp567.889.616.752,00 dan Rp473.684.890.533,00.

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 mengalami peningkatan 19,89 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan adanya peningkatan signifikan pada belanja barang non operasional untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti pencapaian target kinerja dan pelayanan yang bersifat eksternal pada Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	31.438.198.100	29.704.315.801	5,84
Belanja Barang Non Operasional	32.004.052.939	20.837.504.177	53,59
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	1.975.200.443	3.084.903.178	-35,97
Belanja Jasa	340.996.149.068	259.901.825.410	31,20
Belanja Pemeliharaan	14.801.380.983	15.704.945.612	-5,75
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	129.134.723.384	125.395.604.294	2,98
Belanja Perjalanan Luar Negeri	17.640.188.735	19.485.174.847	-9,47
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Total Belanja Barang	567.989.893.652	474.114.273.319	19,80
Pengembalian Belanja Barang	-100.276.900	-429.382.786	-76,65
Jumlah Belanja	567.889.616.752	473.684.890.533	19,89

Belanja Modal
Rp7.460.045.258,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp7.460.045.258,00 dan Rp15.430.952.736,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 51,66 persen dibanding realisasi per 30 Juni 2023. Penyebab penurunan belanja modal utamanya disebabkan penurunan belanja modal lainnya dikarenakan penurunan pengadaan kontrak sewa beli yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.573.313.261	12.349.929.436	(46,77)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	801.110.000	197.535.000	305,55
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	85.621.997	2.883.488.300	(97,03)
Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah (Non Kas)	-	-	-
Total Belanja Modal	7.460.045.258	15.430.952.736	(51,66)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	7.460.045.258	15.430.952.736	(51,66)

Belanja Modal Tanah
Rp0,00

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp6.573.313.261,00

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp6.573.313.261,00 dan Rp12.349.929.436,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 46,77 persen dibanding realisasi per 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan pembukuan pada nilai/kuantitas berupa *wireless access point* serta penghapusan peralatan dan mesin berupa LCD Monitor, *microphone*, *P.C. unit*, lensa kamera, dan personal komputer lainnya.

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.530.051.261	12.330.904.036	-47,04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	43.262.000	19.025.400	127,39
Jumlah Belanja Kotor	6.573.313.261	12.349.929.436	-46,77
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Belanja	6.573.313.261	12.349.929.436	-46,77

Termasuk dalam belanja modal peralatan dan mesin MAK 532111 merupakan belanja *ekstrakomtable* senilai Rp1.400.000,00 yang berdasarkan Bagan Akun Standar Nomor KEP-331/PB/2021 Tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar seharusnya menggunakan MAK 521252.

Atas kesalahan penggunaan MAK tersebut, tidak dapat dilakukan ralat SPM karena sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2021, koreksi sebagian MAK dalam satu SPM tidak dimungkinkan. Namun pencatatan transaksi beban aset ekstrakomtable telah dilakukan secara otomatis pada saat dilakukan pendetailan aset.

Kesalahan atas MAK belanja *ekstrakomtable* dengan MAK belanja modal sebagaimana berikut:

Tabel 18 Kesalahan MAK Belanja *Ekstrakomtable* dengan MAK Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah	Nilai Total	Akun Awal	Akun Seharusnya
I	Pekerjaan Pengadaan Peralatan/Mesin (Pengadaan Mic Delegate Ruang Rapat Lantai 20 Menara Bappenas	2	1.400.000	532111	521252
TOTAL			1.400.000		

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp801.110.000,00*

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp801.110.000,00 dan Rp197.535.000,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 305,55 persen dibandingkan realisasi per 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya rehabilitasi bangunan gedung kantor milik kementerian PPN/Bappenas yang berlokasi di Jalan Taman Suropati.

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	801.110.000	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	197.535.000	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	801.110.000	197.535.000	305,55
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja	801.110.000	197.535.000	305,55

*Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp0,00*

B.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Belanja Modal Lainnya
Rp85.621.997,00

B.2.3.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp85.621.997,00 dan Rp2.883.488.300,00.

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 97,03 persen dibanding realisasi per 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena penurunan pengadaan kontrak sewa beli yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	16.721.997	2.688.564.300	-99,38
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	68.900.000	194.924.000	-64,65
Jumlah Belanja Kotor	85.621.997	2.883.488.300	-97,03
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja	85.621.997	2.883.488.300	-97,03

Terdapat penambahan nilai aset tetap lainnya senilai Rp68.900.000,00 yang termasuk didalam belanja modal penambahan nilai peralatan dan mesin. Atas kesalahan penggunaan MAK tersebut, tidak dapat dilakukan ralat SPM karena sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2021, koreksi sebagian MAK dalam satu SPM tidak dimungkinkan. Namun pencatatan transaksi bebas aset *ekstrakomptabel* telah dilakukan secara otomatis pada saat dilakukan pendetilan aset.

B.3. Catatan Penting Lainnya Atas Laporan Realisasi Anggaran

B.3.1. Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output Prioritas Nasional Semester I Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada **Prioritas Nasional (PN) I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan** dan **Prioritas Nasional (PN) VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik** dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian *Output* dari masing-masing Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. **PN I: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**

Pelaksanaannya di antaranya melalui Program Prioritas (PP) 01.06: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, Kegiatan Prioritas (KP) 01.06.03: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok, Proyek Prioritas (PRO-P) 01.06.03.05: Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark, (CK.6264.PBI.400) Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark, yang tersebar di Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas dengan pagu mencapai Rp4.000.000.000 dan realisasi anggaran Semester I TA 2024 sejumlah Rp958.134.074 atau sebesar 23,95% dengan rincian sebagai berikut.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Output Strategis	%
017312 Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	CK.6264.PBI.400 Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark	4.500.000.000	958.134.074	23,93%	Rekomendasi Kebijakan	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark pada Geopark Gunung Sewu, Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Geopark Rinjani-Lombok 2. Focus Group Discussion dengan masing masing Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Kabupaten Dompu, Pemerintah Kabupaten Sunbawa sebagai bagian dari fasilitasi rencana induk Geopark Bojonegoro, Geopark Pongkor dan Geopark Tambora 3. Proses reviu Rencana Induk Pengembangan Geopark Bojonegoro dan Geopark Pongkor 4. Rapat Koordinasi Kodefikasi geopark dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah 5. Mengikuti persiapan validasi dan revalidasi pada UGGp Batur, UGGp Kaldera Toba, UGGp Belitong, Geopark Nasional Kebumen, Geopark Nasional Meratus 6. Koordinasi teknis bersama Komite Nasional Geopark Indonesia 	24,86%

Adapun manfaat/outcome dari kegiatan Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark tahun 2024 ini diantaranya:

1. Dasar platform kolaborasi peran bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya dalam pembangunan Geopark;
2. Rujukan pembangunan bagi pemerintah daerah khususnya pada sektor-sektor teknis terkait dalam menyusun program dan penganggaran tahunan sektoral untuk mendukung pengembangan Geopark Indonesia;
3. Acuan lengkap dan terpadu bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di dalam menyelenggarakan pembangunan Geopark;
4. Terciptanya percepatan investasi masyarakat dan swasta di dalam pembangunan Kawasan Geopark;
5. Meningkatnya kapasitas pengelolaan Kawasan Geopark yang terencana; dan
6. *Knowledge Sharing* bagi pemerintah daerah dan Badan Pengelola dalam perencanaan, kemitraan dan pendanaan pengelolaan Geopark.

Dampak yang diharapkan bagi perencanaan pembangunan nasional antara lain:

1. Terciptanya kolaborasi antar semua pihak dalam pengembangan geopark;
2. Terciptanya kepedulian masyarakat untuk menjaga wilayah geopark; dan
3. Ekonomi lokal masyarakat meningkat.

2. **PN VII: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Pelaksanaannya di antaranya melalui: Program Prioritas (PP) 07.02: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Kegiatan Prioritas (KP) 07.02.02: Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional, Proyek Prioritas (PRO-P) 07.02.02.02: Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (*Enabling Environment*) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional, (CK.6268.PEC.400)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, yang tersebar di Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas dengan pagu mencapai Rp3.795.000.000,- dan realisasi Semester I TA 2024 sebesar Rp1.136.670.614,- atau 29,95%.

Adapun manfaat/*outcome* dari kegiatan ini diantaranya:

1. Meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia dalam pembentukan arsitektur kerja sama pembangunan global melalui masukan ke berbagai diskusi dan output internasional.
2. Meningkatkan pengaruh dan kepemimpinan Indonesia di Kawasan Asia Pasifik.
3. Meningkatkan peluang kerja sama ekonomi melalui pertukaran pengetahuan, keahlian, dan teknologi yang relevan untuk peluang masa depan yang akan bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan di Indonesia.
4. Memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam inovasi dan teknologi di tingkat regional dan global

Dampak yang diharapkan bagi kemajuan pembangunan nasional antara lain:

1. Memperkuat diplomasi regional Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan menjadikannya pemimpin dalam pembentukan kebijakan regional.
2. Membantu Indonesia menjadi pusat pengetahuan dan inovasi global, khususnya di Asia Pasifik.
3. Memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam ekonomi regional dan global.
4. Memainkan peran lebih besar dalam mempromosikan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik

Selain itu, Program Prioritas (PP) 07.04: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Kegiatan Prioritas (KP) 07.04.03: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis, Proyek Prioritas (PRO-P) 07.04.03.02: Penerapan SPBE Terintegrasi, (CK.6269.UAB.200) Sistem Perencanaan Pendanaan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran, yang tersebar di Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas dengan pagu mencapai Rp 8.991.375.000,- dan realisasi Semester I TA 2024 sebesar Rp 3.628.763.136,- atau 40,36%.

Adapun manfaat/*outcome* dari kegiatan ini diantaranya:

1. Memperkuat proses perencanaan penganggaran Pusat melalui sinkronisasi KRISNA-SAKTI;
2. Memperkuat proses perencanaan penganggaran Pemerintah Daerah melalui KRISNA DAK Fisik, Non Fisik, dan Selaras;
3. Memperkuat proses perencanaan jangka menengah melalui pengembangan KRISNA RPJMN dan KRISNA Renstra.

Dampak yang diharapkan bagi kemajuan pembangunan nasional antara lain:

1. K/L tidak perlu melakukan dua kali input dalam KRISNA dan SAKTI sehingga mengurangi deviasi dalam proses perencanaan penganggaran;
2. Peningkatan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah; dan
3. Terwujudnya keselarasan antara proses bisnis perencanaan jangka menengah tingkat nasional dan Kementerian/Lembaga.

Rincian capaian hingga Semester I Tahun 2024 sebagai berikut:

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Output Strategis	%
017312 Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	CK.6268.PEC.400 Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	3.795.000.000	1.136.670.614	29,95%	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1	1. Pelaksanaan Monitoring-Evaluasi Indikator RPJMN dan RKP terkait KSST. 2. Pelaksanaan ENTRI Towards Implementing Key Events 2024. 3. Pelaksanaan 1st Exchange Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Nepal-Indonesia-Jerman Bidang Decentralised Renewable Energy on Grid Integration. 4. Pelaksanaan 4th SDGs SSTC Project Steering Committee Meeting. 5. Koordinasi pelaksanaan Kegiatan KSST Kenya Bidang Decentralised Renewable Energy dengan Kementerian ESDM dan GIZ Jerman. 6. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia. 7. Pelaksanaan Open Government Partnership Asia-Pacific Learning Experience.	0,00
017312 Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	CK.6269.UAB.200 Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran	8.991.375.000	3.628.763.136	40,36%	Sistem Informasi	1	1. Audit Keamanan Aplikasi Umum KRISNA; 2. Pengembangan KRISNA Renstra untuk penyusunan Ranwal Renstra 2025-2029; 3. Pengembangan KRISNA RPJMN untuk penyusunan Rancangan Teknokratis; 4. Pengembangan KRISNA RKP, KRISNA Renja dan KRISNA Pagu Tahun 2025; 5. Pengembangan KRISNA DAK Fisik, KRISNA DAK Non Fisik dan KRISNA Selaras Tahun 2025; 6. Interkoneksi KRISNA-SAKTI (DIPA 2024 dan Ranwal Renja 2025)	48,79

B.3.2. Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output Per Fungsi APBN Semester I Tahun 2024

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Kementerian PPN/Bappenas antara lain sebagai berikut:

Tabel 21 Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian PPN/Bappenas
 Fungsi : 01 (Pelayanan Umum)
 Sub-Fungsi : 01.01 (Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri)

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan	
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional										
6262 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi										
ABB	401	Kebijakan Perencanaan Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	748.152.000	352.331.101	47,09	1	0	Rekomendasi Kebijakan	47,09	-
ABB	402	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	2.246.640.000	1.403.687.215	62,48	1	0	Rekomendasi Kebijakan	62,48	-
ABB	403	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	186.806.000	102.334.801	54,78	1	0	Rekomendasi Kebijakan	54,78	-
AEA	203	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	163.295.000	51.707.295	31,66	1	0	kegiatan	31,66	-
AEA	403	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	89.854.000	85.376.942	95,02	1	0	kegiatan	95,02	-
AEA	503	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	367.446.000	216.720.600	58,98	1	0	kegiatan	58,98	-
FAE	105	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	641.711.000	261.535.837	40,76	1	0	Laporan	40,76	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

FAE	205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	413.283.000	35.363.960	8,56	1	0	Laporan	8,56	-
FAE	305	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	629.910.000	213.486.216	33,89	1	0	Laporan	33,89	-
FAE	405	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	917.072.000	747.910.528	81,55	1	0	Laporan	81,55	-
FAE	505	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	352.000.000	251.930.221	71,57	1	0	Laporan	71,57	-
ABA	103	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	552.315.000	262.763.817	47,57	1	0	Rekomendasi Kebijakan	47,57	-
ABA	201	Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	1.822.820.000	820.643.941	45,02	1	0	Rekomendasi Kebijakan	45,02	-
ABA	202	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	744.597.000	409.119.492	54,95	1	0	Rekomendasi Kebijakan	54,95	-
ABA	203	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	356.005.000	158.301.372	44,47	1	0	Rekomendasi Kebijakan	44,47	-
ABA	301	Kebijakan Perencanaan Lingkup Keuangan dan BUMN	988.603.000	292.508.179	29,59	1	0	Rekomendasi Kebijakan	29,59	-
ABA	302	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Keuangan dan BUMN	1.264.104.000	569.160.253	45,02	1	0	Rekomendasi Kebijakan	45,02	-
ABA	303	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Keuangan dan BUMN	617.383.000	368.320.512	59,66	1	0	Rekomendasi Kebijakan	59,66	-
ABA	501	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	249.850.000	185.404.513	74,21	1	0	Rekomendasi Kebijakan	74,21	-
ABA	502	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	781.816.000	365.984.990	46,81	1	0	Rekomendasi Kebijakan	46,81	-
ABA	503	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	463.088.000	282.179.897	60,93	1	0	Rekomendasi Kebijakan	60,93	-
ABA	504	Kebijakan Inovasi Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	1.285.800.000	941.081.736	73,19	1	0	Rekomendasi Kebijakan	73,19	-
ABA	101	Kebijakan Perencanaan Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	2.927.789.000	1.114.877.995	38,08	1	0	Rekomendasi Kebijakan	38,08	-
ABA	102	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	1.303.735.000	779.432.913	59,78	1	0	Rekomendasi Kebijakan	59,78	-
6263 Perencanaan Pembangunan Regional										

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ABP	202	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Pembangunan Daerah	1.000.000.000	463.137.396	46,31	1	0	Rekomendasi Kebijakan	68	-
ABP	203	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional jangka Menengah Lingkup Pembangunan Daerah	1.500.000.000	317.879.671	21,19	1	0	Rekomendasi Kebijakan	24	-
ABP	204	Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Prioritas	1.600.000.000	252.653.547	15,79	1	0	Rekomendasi Kebijakan	21	-
ABP	205	Kebijakan Inovasi Lingkup Pembangunan Daerah	4.050.000.000	1.206.836.286	29,8	1	0	Rekomendasi Kebijakan	40	-
ABP	301	Kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah Regional I	4.800.000.000	1.126.136.349	23,46	2	0	Rekomendasi Kebijakan	24,25	-
ABP	302	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Pengembangan Wilayah Regional I	1.319.179.000	298.235.020	22,61	2	0	Rekomendasi Kebijakan	26,5	-
ABP	303	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Pengembangan Wilayah Regional I	2.050.000.000	930.284.388	45,38	2	0	Rekomendasi Kebijakan	46,46	-
ABP	401	Kebijakan Perencanaan Lingkup Pengembangan Wilayah Regional II	700.000.000	285.885.802	40,84	1	0	Rekomendasi Kebijakan	55	-
ABP	402	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Pengembangan Wilayah Regional II	1.914.915.000	791.679.457	41,34	1	0	Rekomendasi Kebijakan	39	-
ABP	403	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Pengembangan Wilayah Regional II	1.200.000.000	394.646.889	32,89	1	0	Rekomendasi Kebijakan	53	-
ABP	101	Kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah	6.101.832.000	2.532.804.631	41,51	1	0	Rekomendasi Kebijakan	44	-
ABP	102	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana	700.000.000	331.021.718	47,29	1	0	Rekomendasi Kebijakan	58	-
ABP	201	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.350.000.000	3.337.982.386	27,03	1	0	Rekomendasi Kebijakan	34	-
FAE	305	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah Regional I	1.000.000.000	273.518.109	27,35	1	0	Laporan	32,18	-
FAE	405	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah Regional II	1.400.000.000	417.653.864	29,83	1	0	Laporan	31	-
FAE	505	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah Regional III	2.088.485.000	1.197.417.392	57,33	1	0	Laporan	78	-
ABP	404	Kebijakan Percepatan Pengembangan Wilayah Regional II	1.350.000.000	495.739.830	36,72	1	0	Rekomendasi Kebijakan	35	-
ABP	405	Kebijakan Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara	1.000.000.000	410.051.730	41,01	1	0	Rekomendasi Kebijakan	42	-
ABP	501	Kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah Regional III	7.342.691.000	979.892.765	13,35	1	0	Rekomendasi Kebijakan	16	-
ABP	502	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Pengembangan Wilayah Regional III	1.098.033.000	381.168.850	34,71	1	0	Rekomendasi Kebijakan	36	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ABP	503	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Pengembangan Wilayah Regional III	1.580.000.000	724.668.232	45,87	1	0	Rekomendasi Kebijakan	50	-
ABP	504	Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Prioritas	2.000.000.000	325.408.952	16,27	1	0	Rekomendasi Kebijakan	16	-
ABP	505	Kebijakan Inovasi Lingkup Pengembangan Wilayah Regional III	4.750.000.000	446.437.404	9,4	1	0	Rekomendasi Kebijakan	12	-
AEA	203	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Pembangunan Daerah	500.000.000	97.960.535	19,59	1	0	kegiatan	23	-
FAE	105	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana	425.000.000	162.588.009	38,26	1	0	Laporan	45	-
FAE	205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pembangunan Daerah	6.212.856.000	1.883.216.432	30,31	1	0	Laporan	43	-
6264 Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam										
FAE	405	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	1.500.000.000	461.647.925	30,78	1	0	Laporan	30,78	-
FAE	505	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Lingkungan Hidup	500.000.000	250.404.281	50,08	1	0	Laporan	50,08	-
PBI	400	Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark	4.000.000.000	957.145.446	23,93	1	0	Rekomendasi Kebijakan	23,93	-
ABW	302	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Kelautan dan Perikanan	2.400.000.000	947.918.607	39,5	2	0	Rekomendasi Kebijakan	39,5	-
ABW	303	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Kelautan dan Perikanan	1.600.000.000	289.180.716	18,07	1	0	Rekomendasi Kebijakan	18,07	-
AEA	103	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Pangan dan Pertanian	1.000.000.000	48.175.936	4,82	1	0	kegiatan	4,82	-
AEA	203	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	500.000.000	-	0	1	0	kegiatan	0	-
ABV	202	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	900.000.000	330.687.962	36,74	1	0	Rekomendasi Kebijakan	36,74	-
ABV	203	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	1.274.370.000	426.998.180	33,51	1	0	Rekomendasi Kebijakan	33,51	-
ABV	204	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)	9.206.000.000	2.010.263.479	21,84	2	0	Rekomendasi Kebijakan	21,84	-
ABW	301	Kebijakan Perencanaan Lingkup Kelautan dan Perikanan	5.800.000.000	1.246.266.078	21,49	5	0	Rekomendasi Kebijakan	21,49	-
ABR	102	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Pangan dan Pertanian	2.500.000.000	1.221.205.359	48,85	1	0	Rekomendasi Kebijakan	48,85	-
ABR	103	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Pangan dan Pertanian	2.000.000.000	1.027.886.360	51,39	1	0	Rekomendasi Kebijakan	51,39	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ABR	104	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Major Project Food Estate dan Korporasi Petani dan Nelayan	2.772.300.000	915.432.936	33,02	1	0	Rekomendasi Kebijakan	33,02	-
ABR	105	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)	2.033.537.000	205.332.902	10,1	1	0	Rekomendasi Kebijakan	10,1	-
ABV	201	Kebijakan Perencanaan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	2.375.675.000	270.257.144	11,38	2	0	Rekomendasi Kebijakan	11,38	-
ABI	401	Kebijakan Perencanaan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	1.000.000.000	437.334.910	43,73	1	0	Rekomendasi Kebijakan	43,73	-
ABI	408	Kebijakan Percepatan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	1.692.540.000	761.478.528	44,99	2	0	Rekomendasi Kebijakan	44,99	-
ABJ	501	Kebijakan Perencanaan Lingkup Lingkungan Hidup	2.625.047.000	651.163.845	24,81	4	0	Rekomendasi Kebijakan	24,81	-
ABJ	502	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Lingkungan Hidup	600.000.000	321.054.273	53,51	1	0	Rekomendasi Kebijakan	53,51	-
ABJ	503	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Lingkungan Hidup	1.200.000.000	530.321.887	44,19	1	0	Rekomendasi Kebijakan	44,19	-
ABJ	504	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)	3.044.000.000	1.344.511.824	44,17	1	0	Rekomendasi Kebijakan	44,17	-
ABR	101	Kebijakan Perencanaan Lingkup Pangan dan Pertanian	2.227.700.000	397.682.197	17,85	1	0	Rekomendasi Kebijakan	17,85	-
AEA	303	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Kelautan dan Perikanan	1.600.000.000	300.194.790	18,76	4	0	kegiatan	18,76	-
AEA	403	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	800.000.000	481.226.557	60,15	1	0	kegiatan	60,15	-
FAE	105	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pangan dan Pertanian	1.500.000.000	240.975.840	16,07	1	0	Laporan	16,07	-
FAE	205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	1.149.630.000	406.997.851	35,4	2	0	Laporan	34,65	-
FAE	305	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kelautan dan Perikanan	2.100.000.000	639.456.141	30,45	2	0	Laporan	30,86	-
ABW	304	Kebijakan Percepatan Lingkup Perubahan Iklim	25.550.000.000	7.686.576.144	30,08	1	0	Rekomendasi Kebijakan	45	-
6265 Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan										
ABK	202	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Ketenagakerjaan	1.316.396.000	625.574.156	47,52	1	0	Rekomendasi Kebijakan	47,52	-
ABK	203	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Ketenagakerjaan	990.000.000	219.712.476	22,19	1	0	Rekomendasi Kebijakan	22,19	-
ABN	102	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	950.000.000	519.319.249	54,67	1	0	Rekomendasi Kebijakan	54,67	-
ABN	104	Kebijakan Inovasi Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	1.897.441.000	907.998.023	47,85	1	0	Rekomendasi Kebijakan	47,94	-
ABN	301	Kebijakan Perencanaan Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan	3.314.395.000	838.087.362	25,29	1	0	Rekomendasi Kebijakan	25,29	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

		Masyarakat								
ABK	401	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	761.962.000	337.547.875	44,3	1	0	Rekomendasi Kebijakan	44,3	-
ABK	402	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	1.234.532.000	597.439.386	48,39	1	0	Rekomendasi Kebijakan	48,39	-
ABK	404	Kebijakan Implementasi Perluasan Model Kemitraan Strategis Antara Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)	2.000.000.000	841.244.187	42,06	1	0	Rekomendasi Kebijakan	42,06	-
ABK	405	Kebijakan Inovasi Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	601.273.000	184.603.340	30,7	1	0	Rekomendasi Kebijakan	30,7	-
ABN	101	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	700.000.000	130.289.067	18,61	1	0	Rekomendasi Kebijakan	18,61	-
ABN	302	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	450.000.000	179.991.206	40	1	0	Rekomendasi Kebijakan	40	-
ABN	304	Kebijakan Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu Di Level Pusat, Provinsi, Kab/Kota, dan Desa	1.830.174.000	396.698.969	21,68	1	0	Rekomendasi Kebijakan	21,68	-
ABN	305	Kebijakan Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi Desa Cemara	3.500.000.000	1.110.482.724	31,73	1	0	Rekomendasi Kebijakan	31,73	-
ABN	306	Kebijakan Inovasi Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.200.000.000	403.746.567	33,65	1	0	Rekomendasi Kebijakan	33,65	-
FAE	105	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	1.150.000.000	377.491.916	32,83	1	0	Laporan	32,83	-
FAE	205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Ketenagakerjaan	1.600.000.000	502.712.721	31,42	1	0	Laporan	31,42	-
FAE	305	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	1.200.000.000	210.354.921	17,53	1	0	Laporan	17,53	-
FAE	405	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	893.973.000	447.351.481	50,04	1	0	Laporan	49,96	-
6266 Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan										
ABH	201	Kebijakan Perencanaan Lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	1.700.000.000	657.127.744	38,65	1	0,2	Rekomendasi Kebijakan	38,65	-
ABH	301	Kebijakan Perencanaan Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.200.000.000	359.714.286	29,98	1	0,2	Rekomendasi Kebijakan	29,98	-
ABH	308	Kebijakan Percepatan Pembangunan Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	700.000.000	171.220.855	24,46	1	0,2	Rekomendasi Kebijakan	24,46	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ABN	408	Kebijakan Percepatan Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	1.100.000.000	377.786.372	34,34	1	0,2	Rekomendasi Kebijakan	34,34	-
AEA	103	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1.100.000.000	741.841.895	67,44	1	0,2	kegiatan	67,44	-
AEA	203	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	2.400.000.000	910.929.584	37,96	1	0,2	kegiatan	37,95	-
AEA	303	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	800.000.000	428.080.242	53,51	1	0,2	kegiatan	53,35	-
AEA	403	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	2.050.000.000	752.900.004	36,73	1	0,2	kegiatan	36,73	-
FAE	105	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	900.000.000	301.191.179	33,47	1	0,2	Laporan	33,47	-
FAE	205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	1.900.000.000	475.363.226	25,02	1	0,2	Laporan	25,02	-
ABG	101	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1.600.000.000	317.679.771	19,85	1	0,2	Rekomendasi Kebijakan	19,85	-
ABG	108	Kebijakan Percepatan Pembangunan Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	24.638.026.000	1.920.035.635	7,79	1	0,2	Rekomendasi Kebijakan	7,79	-
FAE	305	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.200.000.000	296.125.359	24,68	1	0,2	Laporan	24,68	-
FAE	405	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	1.800.000.000	524.440.040	29,14	1	0,2	Laporan	29,14	-
6267 Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana										
ABF	503	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Perumahan dan Permukiman	1.000.000.000	567.346.104	56,73	1	0	Rekomendasi Kebijakan	50	-
AEA	103	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Pengairan dan Irigasi	1.343.787.000	48.003.844	3,57	1	0	kegiatan	0	-
FAE	505	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perumahan dan Permukiman	1.000.000.000	245.761.606	24,58	1	0	Laporan	40	-
ABF	303	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika	700.000.000	323.717.389	46,25	1	0	Rekomendasi Kebijakan	44	-
ABF	401	Kebijakan Perencanaan Lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	2.000.000.000	783.997.206	39,2	1	0	Rekomendasi Kebijakan	36	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ABF	402	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	2.000.000.000	765.019.362	38,25	1	0	Rekomendasi Kebijakan	31	-
ABF	403	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	1.000.000.000	370.165.217	37,02	1	0	Rekomendasi Kebijakan	35	-
ABF	501	Kebijakan Perencanaan Lingkup Perumahan dan Permukiman	14.750.000.000	4.672.730.168	31,68	1	0	Rekomendasi Kebijakan	50	-
ABF	502	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Perumahan dan Permukiman	2.250.000.000	802.413.175	35,66	1	0	Rekomendasi Kebijakan	50	-
ABF	101	Kebijakan Perencanaan Lingkup Pengairan dan Irigasi	1.140.449.000	322.416.433	28,27	1	0	Rekomendasi Kebijakan	28, 27	-
ABF	102	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Pengairan dan Irigasi	20.721.377.000	7.218.177.052	34,83	1	0	Rekomendasi Kebijakan	34, 82	-
ABF	201	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Transportasi	8.000.000.000	3.167.510.088	39,59	1	0	Rekomendasi Kebijakan	39	-
ABF	202	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Transportasi	2.500.000.000	1.216.059.628	48,64	1	0	Rekomendasi Kebijakan	45	-
ABF	203	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Transportasi	6.500.000.000	47.169.901	0,73	1	0	Rekomendasi Kebijakan	20	-
ABF	301	Kebijakan Perencanaan Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika	3.197.534.000	1.272.689.463	39,8	1	0	Rekomendasi Kebijakan	38	-
ABF	302	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika	1.800.000.000	482.511.851	26,81	1	0	Rekomendasi Kebijakan	24	-
AEA	303	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika	300.000.000	87.968.011	29,32	1	0	kegiatan	25	-
AEA	503	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Perumahan dan Permukiman	1.000.000.000	327.220.000	32,72	1	0	kegiatan	50	-
FAE	105	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pengairan dan Irigasi	215.950.000	128.699.310	59,6	1	0	Laporan	59, 6	-
FAE	205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Transportasi	3.000.000.000	1.098.339.156	36,61	1	0	Laporan	31	-
FAE	305	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Ketenagalistrikan Telekomunikasi, dan Informatika	1.200.000.000	557.922.454	46,49	1	0	Laporan	43	-
FAE	405	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	3.500.000.000	1.249.185.727	35,69	1	0	Laporan	22	-
6268 Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan										

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ABQ	203	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Aparatur Negara	1.950.000.000	335.274.906	17,19	1	0	Rekomendasi Kebijakan	17,19	-
AEA	103	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Politik dan Komunikasi	520.000.000	124.463.000	23,94	1	0	kegiatan	23,94	-
AEA	203	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Aparatur Negara	800.000.000	240.904.569	30,11	1	0	kegiatan	30,11	-
AEA	303	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Hukum dan Regulasi	2.399.500.000	634.257.945	26,43	1	0	kegiatan	26,43	-
AEA	403	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	200.000.000	102.364.148	51,18	1	0	kegiatan	51,18	-
AEA	503	Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Pertahanan dan Keamanan	1.082.482.000	196.102.000	18,12	1	0	kegiatan	18,12	-
FAE	105	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Politik dan Komunikasi	1.912.300.000	579.996.890	30,33	1	0	Laporan	30,2	-
ABC	101	Kebijakan Perencanaan Lingkup Politik dan Komunikasi	4.137.700.000	1.257.931.285	30,4	1	0	Rekomendasi Kebijakan	30,4	-
ABC	102	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Politik dan Komunikasi	860.000.000	247.112.667	28,73	1	0	Rekomendasi Kebijakan	28,73	-
FAE	205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Aparatur Negara	1.450.000.000	536.267.785	36,98	1	0	Laporan	36,98	-
FAE	305	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Hukum dan Regulasi	3.135.500.000	939.347.186	29,96	1	0	Laporan	29,96	-
FAE	405	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	600.000.000	261.807.553	43,63	1	0	Laporan	43,63	-
FAE	505	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pertahanan dan Keamanan	2.031.074.000	834.792.138	41,1	2	0	Laporan	41,1	-
PEC	400	Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	3.795.000.000	455.638.942	12,01	1	0	Kesepakatan	12,01	-
ABC	103	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Politik dan Komunikasi	1.570.000.000	714.962.779	45,54	1	0	Rekomendasi Kebijakan	45,54	-
ABC	401	Kebijakan Perencanaan Lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	945.026.000	320.636.088	33,93	1	0	Rekomendasi Kebijakan	33,93	-
ABC	402	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	300.000.000	166.337.240	55,45	1	0	Rekomendasi Kebijakan	55,45	-
ABC	403	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	400.000.000	304.051.080	76,01	1	0	Rekomendasi Kebijakan	76,01	-
ABD	301	Kebijakan Perencanaan Lingkup Hukum dan Regulasi	2.450.000.000	901.547.232	36,8	1	0	Rekomendasi Kebijakan	36,8	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ABD	303	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Hukum dan Regulasi	1.015.000.000	317.580.058	31,29	1	0	Rekomendasi Kebijakan	31,29	-
ABE	501	Kebijakan Perencanaan Lingkup Pertahanan dan Keamanan	2.037.736.000	473.534.000	23,24	1	0	Rekomendasi Kebijakan	23,24	-
ABE	502	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Pertahanan dan Keamanan	1.020.770.000	389.538.164	38,16	1	0	Rekomendasi Kebijakan	38,16	-
ABE	503	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Pertahanan dan Keamanan	1.020.046.000	368.626.000	36,14	1	0	Rekomendasi Kebijakan	36,14	-
ABQ	202	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Aparatur Negara	800.000.000	233.073.645	29,13	1	0	Rekomendasi Kebijakan	29,13	-
6269 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan										
FAB	202	Sistem/regulasi Perencanaan Lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan	227.920.000	33.411.945	14,66	1	0	Sistem Informasi	14,66	-
FAE	105	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan	1.000.000.000	29.200.000	2,92	1	0	Laporan	2,92	-
FAE	205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan	260.960.000	57.231.179	21,93	1	0	Laporan	21,93	-
FAE	305	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pendanaan Luar Negeri Bilateral	1.064.892.000	506.408.924	47,55	1	0	Laporan	47,55	-
FAE	405	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pendanaan Luar Negeri Multilateral	2.050.000.000	824.887.063	40,24	1	0	Laporan	40,24	-
ABL	208	Kebijakan Percepatan Pembangunan Lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan	1.675.734.000	120.667.355	7,2	1	0	Rekomendasi Kebijakan	7,2	-
ABL	301	Kebijakan Perencanaan Lingkup Pendanaan Luar Negeri Bilateral	2.535.108.000	869.508.930	34,3	5	0	Rekomendasi Kebijakan	34,28	-
ABL	401	Kebijakan Perencanaan Lingkup Pendanaan Luar Negeri Multilateral	1.750.000.000	307.307.989	17,56	1	0	Rekomendasi Kebijakan	17,56	-
FAE	505	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pengembangan Pendanaan	580.000.000	82.503.003	14,22	1	0	Laporan	14,22	-
UAB	200	Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran	8.991.375.000	3.628.763.136	40,36	1	0	Sistem Informasi	40,36	-
ABL	501	Kebijakan Perencanaan Lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan	9.813.759.000	2.028.998.494	20,68	1	0	Rekomendasi Kebijakan	20,67	-
ABL	503	Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan	810.000.000	58.475.000	7,22	1	0	Rekomendasi Kebijakan	7,7	-
AEA	403	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Pendanaan Multilateral	2.200.000.000	868.018.208	39,46	1	0	kegiatan	39,46	-
ABL	101	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan	5.000.000.000	1.648.402.741	32,97	1	0	Rekomendasi Kebijakan	32,97	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ABL	201	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan	844.060.000	113.193.455	13,41	1	0	Rekomendasi Kebijakan	13,41	-
AEA	304	Kegiatan Dukungan Satker Majelis Wali Amanat Program Hibah COMPACT II	13.000.000.000	4.185.749.890	32,2	1	0	kegiatan	44,42	-
6270 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan										
FAE	206	Informasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor	11.496.744.000	3.163.024.399	27,51	4	0	Laporan	33	-
FAE	306	Informasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	11.028.620.000	5.094.291.904	46,19	2	0	Laporan	46,19	-
FAE	406	Informasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan	1.880.618.000	984.017.200	52,32	2	0	Laporan	52,32	-
AEA	303	Rencana Pembangunan Nasional Jangka pendek Lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1.200.000.000	346.484.314	28,87	1	0	kegiatan	34	-
AEA	403	Rencana Pembangunan Nasional Jangka pendek Lingkup Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan	6.119.382.000	3.130.507.401	51,16	1	0	kegiatan	51,16	-
AEA	103	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	1.100.000.000	495.348.642	45,03	1	0	kegiatan	45,03	-
AEA	107	Regulasi Mekanisme dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	2.000.000.000	1.099.115.893	54,96	1	0	kegiatan	54,95	-
AEA	203	Rencana Pembangunan Nasional Jangka pendek Lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor	496.076.000	316.870.377	63,88	1	0	kegiatan	63,88	-
FAB	107	Sistem/regulasi Pengendalian Lingkup Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	2.500.000.000	763.756.752	30,55	1	0	Sistem Informasi	40,41	-
FAE	105	Informasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Sistem dan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	2.400.000.000	768.258.055	32,01	1	0	Laporan	36,96	-
6271 Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang										
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.163.594.000	580.316.350	49,87	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	49,87	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	852.704.000	84.678.000	9,93	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	37	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	906.874.000	257.334.363	28,38	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	29	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.101.754.000	600.201.062	54,48	1	0,54	Daerah (Prov/Kab/Kota)	76,85	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	960.924.000	677.722.079	70,53	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	87,33	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	531.294.000	-	0	1	0,6	Daerah (Prov/Kab/Kota)	30	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.040.564.000	474.682.900	45,62	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	49,98	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.038.224.000	-	0	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	23	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	979.914.000	639.238.724	65,23	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	66	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.170.444.000	829.653.100	70,88	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	70,63	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.397.854.000	690.746.388	49,41	1	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	52,4	-
ABA	301	Kebijakan Perencanaan Lingkup Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	2.500.000.000	518.072.110	20,72	1	0	Rekomendasi Kebijakan	20,72	-
ABA	801	Kebijakan Perencanaan Lingkup Analisis Kebijakan dan Kinerja	9.158.000.000	3.623.711.413	39,57	4	0	Rekomendasi Kebijakan	39,57	-
ABF	301	Kebijakan Perencanaan Lingkup Pengembangan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	3.500.000.000	1.271.868.816	36,34	1	0	Rekomendasi Kebijakan	36,34	-
ABL	401	Kebijakan Perencanaan Lingkup Hubungan Kelembagaan	2.000.000.000	126.352.923	6,32	2	0	Rekomendasi Kebijakan	6,32	-
ABN	201	Kebijakan Perencanaan Lingkup Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	8.201.466.000	1.832.252.968	22,34	2	0	Rekomendasi Kebijakan	22,34	-
ABP	K08	Kebijakan Percepatan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	2.500.000.000	687.279.085	27,49	1	0	Rekomendasi Kebijakan	27,49	-
AEA	903	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana (Kajian Strategis)	170.887.676.000	41.040.707.858	24,02	1	0	kegiatan	10,59	-
AEA	905	Fasilitasi Pembangunan Paviliun World Expo Osaka	506.900.000.000	88.631.591.323	17,49	1	0	kegiatan	22,28	-
AEA	906	Kebijakan Percepatan Pengembangan dan Komersialisasi Pesawat N219A	210.000.000.000	-	0	1	0	kegiatan	0	-
FAB	102	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	47.500.000.000	9.192.059.877	19,35	1	0	Sistem Informasi	19,35	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.172.264.000	83.819.322	7,15	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	48,6	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.475.434.000	471.283.793	31,94	1	0,2728	Daerah (Prov/Kab/Kota)	31,94	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.182.324.000	516.250.882	43,66	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	52	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	217.744.000	140.172.000	64,37	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0,6	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.403.304.000	700.148.811	49,89	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	55,61	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.081.524.000	861.474.809	79,65	1	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	47	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	803.944.000	618.674.230	76,95	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	49,98	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	466.704.000	-	0	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0,6	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.346.264.000	772.798.777	57,4	1	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	44,31	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	976.944.000	141.515.510	14,49	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	44,79	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	973.004.000	385.176.038	39,59	1	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	43	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	665.604.000	158.952.503	23,88	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	30	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	974.174.000	328.739.010	33,75	1	0,3375	Daerah (Prov/Kab/Kota)	33,75	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	1.367.654.000	435.905.736	31,87	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	31,87	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	967.604.000	480.310.369	49,64	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	54,24	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	967.664.000	505.092.401	52,2	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	62	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	962.374.000	609.644.530	63,35	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	66,65	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	968.734.000	520.944.280	53,78	1	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	59,59	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	534.064.000	177.965.933	33,32	1	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	28,3	-
FBA	903	Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi	908.824.000	198.023.310	21,79	1	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)	53,4	-
6272 Fasilitas Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan										
-										
FAC	194	Perencanaan, Persiapan, Pengembangan, Publikasi dan Informasi serta Evaluasi Program	24.409.269.000	7.541.664.723	30,9	1	0	Orang	49,98	-
FAC	192	Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan	2.742.500.000	851.140.212	31,04	1	0	Orang	40	-
FAC	193	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana	1.974.335.000	485.844.957	24,61	1	0	Orang	20	-
FAC	191	Program Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	68.933.520.000	13.965.267.094	20,26	2343	599	Orang	25,57	-
WA Program Dukungan Manajemen										
6257 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik										
EBA	963	Layanan Data dan Informasi	56.000.000.000	19.126.632.341	34,15	1	0	Layanan	50	-
EBD	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	6.820.419.000	3.943.163.116	57,81	1	0	Dokumen	43,27	-
EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4.094.000.000	2.731.988.457	66,73	9	0	Layanan	49,98	-
EBA	959	Layanan Protokol	13.933.441.000	10.252.016.229	73,58	1	0	Layanan	49,98	Pergantian operator input capaian output RO dan belum terdapat transfer knowledge cara pengisian caput RO
6258 Legislasi dan Litigasi										
EBA	957	Layanan Hukum	3.350.000.000	1.156.261.686	34,52	2	0	Layanan	49,98	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

EBA	969	Layanan Bantuan Hukum	21.405.000	-	0	2	0	Layanan	49,98	Kegiatan Layanan Bantuan Hukum telah dilaksanakan sekitar 40-50% hingga 30 Juni 2024 tetapi pertanggungjawabannya belum selesai karena hanya jamuan/konsumsi rapat
EBA	970	Layanan Kerja Sama	1.628.595.000	549.867.588	33,76	1	0	Layanan	25	-
6259 Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan SDM										
EBC	954	Layanan Manajemen SDM	6.510.414.000	3.196.093.975	49,09	1	0	Orang	49,09	-
EBC	996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	332.871.000	-	0	1	0	Orang	0	-
EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	27.000.000	24.507.156	90,77	3	0	Dokumen	98,21	-
EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	177.503.582	73,96	1	0	Dokumen	73,96	-
EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5.733.000.000	2.812.943.089	49,07	1	0	Layanan	52,86	-
EBA	962	Layanan Umum	32.090.776.000	15.763.863.123	49,12	1	0	Layanan	53,73	-
6260 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum										
EBB	971	Layanan Prasarana Internal	41.683.000.000	14.829.304.493	35,58	1	1	Unit	36,21	-
EBA	956	Layanan BMN	2.342.100.000	1.235.438.218	52,75	15	0	Layanan	52,75	-
EBA	994	Layanan Perkantoran	373.398.444.000	264.260.727.041	70,77	1	1	Layanan	49,98	-
EBA	995	Layanan Rumah Tangga	10.264.622.000	2.125.677.984	20,71	1	0	Layanan	25	-
EBB	951	Layanan Sarana Internal	52.134.123.000	22.620.236.633	43,39	1	0,5	Unit	50,24	-
6261 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal										
EBD	714	Fasilitasi Penguatan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas	600.000.000	133.942.400	22,32	1	0	Laporan	54,45	Saat ini di kegiatan terkendala pagu minus, sehingga realisasi belanjanya (perjalanan dinas) rendah, sedang menunggu revisi Terdapat honor OB yang belum dicairkan dari Bulan Januari - Juni
EBD	711	Pelaksanaan Pengawasan Intern Lingkup Administrasi Umum dan/atau Keuangan	900.000.000	450.467.610	50,05	1	0	Dokumen	60,38	-
EBD	712	Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Administrasi Umum dan/atau Keuangan	1.100.000.000	374.506.474	34,05	1	0	Laporan	56,62	-Mayoritas terdapat kegiatan yang beririsan dengan kegiatan lainnya, sehingga realisasi kegiatan tidak pada RO yang telah dipetakan pada awal perencanaan. -Beberapa kegiatan yang telah dianggarkan, pertanggungjawaban kegiatan tersebut di realisasikan oleh UKE lainnya.
EBD	713	Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat Lingkup Administrasi Umum dan/atau Keuangan	400.000.000	136.873.705	34,22	1	0	Laporan	25	-
EBD	715	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2.000.000.000	530.911.931	26,55	1	0	Laporan	31,33	-
EBD	716	Koordinasi Penguatan Manajemen Internal APIP	1.500.000.000	682.534.078	45,5	1	0	Laporan	52,83	-
EBD	721	Pelaksanaan Pengawasan Internal Lingkup Kinerja Kelembagaan	1.250.000.000	377.191.047	30,18	1	0	Layanan	50,32	Kegiatan di pengawasan dan kapabilitas APIP memang sudah berjalan dan beberapa sudah menghasilkan output, tetapi untuk kegiatan yang membutuhkan anggaran besar akan dilaksanakan di semester II ini seperti Evaluasi SAKIP dan Audit Kinerja

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

EBD	722	Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup Kinerja Kelembagaan	330.000.000	198.776.816	60,24	1	1	Laporan	50	-
EBD	723	Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kinerja Kelembagaan	350.000.000	223.873.871	63,96	1	0	Laporan	60	-
EBD	724	Fasilitasi Penguatan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kinerja Kelembagaan	300.000.000	150.058.875	50,02	1	0	Laporan	50	-
EBD	725	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	870.000.000	148.847.130	17,11	1	0	Laporan	49	Beberapa kegiatan kapabilitas APIP dibiayai oleh SDM Untuk semester II akan ada Diklat Luar Negeri
EBD	726	Koordinasi Penguatan Manajemen Internal APIP Lingkup Kinerja Kelembagaan	400.000.000	204.146.898	51,04	1	0	Laporan	55	-
Subtotal			2.164.223.785.000	691.553.136.695						
Penyesuaian			1.798.228.000	47.813.542						
Total			2.166.022.013.000	691.600.950.237						

Penyesuaian pada Pagu Anggaran berasal dari proses revisi anggaran yang dilakukan setelah proses pengiriman capaian output, sedangkan penyesuaian pada Realisasi Anggaran berasal dari perubahan pasca pengiriman capaian output dan setoran pengembalian belanja yang dilakukan diluar periode pelaporan realisasi.

Data Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Kementerian PPN/Bappenas. tidak ditemukan anomali dalam pelaporan capaian output, baik pelaporan Program Prioritas (PN) maupun bukan Program Prioritas (Non PN) pada Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan capaian kinerja, terdapa 8 (Delapan) RO Bukan Program Prioritas (Non PN) dengan capaian kinerja terlalu rendah dan 2 (Dua) RO Bukan Program Prioritas (Non PN) dengan capaian terlalu rendah. Selain itu, 3 (Tiga) RO Program Prioritas Nasional pada Kementerian PPN/Bappenas telah menunjukkan kesesuaian. Penjelasan atas keterangan akan dijadikan evaluasi bagi Kementerian PPN/Bappenas pada periode pelaporan selanjutnya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp6.205.590.320,00

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian PPN/Bappenas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.205.590.320,00 dan Rp84.294.315,00. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Kas di Bendahara Pengeluaran - UP	5.308.272.320,00	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	897.318.000	84.294.315	964,51
Jumlah	6.205.590.320	84.294.315	7.261,81

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp6.205.590.320,00 merupakan sisa UP dan TUP yang belum dipertanggungjawabkan per 30 Juni 2024.

Rincian atas Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada lampiran 1.

Pada tahun 2024, Uang Persediaan yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari dua jenis yaitu dalam bentuk Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Adapun rincian proporsi pembagian UP KKP Tahun 2023 untuk masing - masing PPK adalah sebagai berikut.

Tabel 23 Rincian Pembagian Uang Persediaan TA 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Satker	PPK	UP Tunai	UP KKP
1		PPK DM I	245.000.000	200.000.000
2		PPK DM II	190.000.000	72.000.000
3		PPK DM III	605.000.000	382.000.000
4		PPK DM IV	400.000.000	200.000.000
5		PPK DM V	100.000.000	72.000.000
6		PPK DM VI	70.000.000	150.000.000
7		PPK DM VII	100.000.000	144.000.000
8		PPK PPN I	70.000.000	72.000.000
9		PPK PPN II	220.000.000	152.000.000
10		PPK PPN III	165.000.000	72.000.000
11	SATKER BAPPENAS	PPK PPN IV	100.000.000	132.000.000
12		PPK PPN V	165.000.000	250.000.000
13		PPK PPN VI	200.000.000	72.000.000
14		PPK PPN VII	140.000.000	72.000.000
15		PPK PPN VIII	150.000.000	72.000.000
16		PPK PPN IX	395.000.000	100.000.000
17		PPK PPN X	250.000.000	120.000.000
18		PPK PPN XI	110.000.000	72.000.000
19		PPK PPN XII	125.000.000	80.000.000
20		PPK PPN XVII	85.000.000	72.000.000
21		PPK PPN XVIII	100.000.000	72.000.000
22		PPK PPN XX	125.000.000	100.000.000
23		PPK PPN XXI	90.000.000	70.000.000
Total			4.200.000.000	2.800.000.000

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp17.198.719.194,00

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.198.719.194,00 dan Rp5.974.233.928,00. Kas Lainnya dan Setara Kas meliputi saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran selain UP/TUP, kas lainnya dari hibah sudah disahkan dan kas lainnya dari hibah belum disahkan. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.277.960.861	25.975.232	20.219,21
Kas Lainnya di K/L dari Hibah Sudah Disahkan	5.948.258.696	5.948.258.696	-
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	5.972.499.637	25.975.232	22.893,06
Jumlah	17.198.719.194	5.974.233.928	187,88

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp17.198.719.194,00 terdiri dari Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.277.960.861,00, Kas Lainnya dari Hibah Sudah Disahkan sebesar Rp5.948.258.696,00, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp5.972.499.637,00.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo pada Satker Bappenas sebesar Rp5.143.152.342,00; Bappeda Provinsi Lampung sebesar Rp1.117.500,00; Bappeda Provinsi Bali sebesar Rp78.388,00; Bappeda Provinsi NTT sebesar Rp1.510.160,00; Bappeda Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp2.500,00; dan MWA MCAI II sebesar Rp130.164.971,00.

Kas Lainnya dari Hibah Sudah Disahkan merupakan saldo hibah langsung uang yang sudah disahkan pada periode Semester I TA 2024, yang berasal dari Satker Bappenas dan MWA ICCTF. Dari satker Bappenas diantaranya dari proyek hibah UNICEF sebesar Rp3.298.217.205,00 dan READSI sebesar Rp3.015.344,00. Adapun dari satker ICCTF berasal dari proyek hibah Blue Carbon sebesar Rp2.647.026.147,00.

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan pada lampiran 2.

Belanja Dibayar di Muka
Rp14.322.719.747,00

C.3. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.322.719.747,00 dan Rp14.322.719.747,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Karyawan PHRD IV	11.236.375.553	11.236.375.553	-
Karyawan Program Coremap	-	-	-
Karyawan RM	3.086.344.194	3.086.344.194	-
Jumlah	14.322.719.747	14.322.719.747	-

Saldo Belanja Dibayar di Muka merupakan saldo pada Satker Bappenas yang berasal dari pembayaran di muka atas tunjangan karyawan pada PPK PPN X. Saldo Belanja Dibayar di Muka Semester 1 TA 2024 masih menggunakan saldo per akhir tahun sebelumnya yang akan disesuaikan nilainya secara tahunan di periode Semester II TA 2024. Saldo Belanja Dibayar di Muka dengan rincian sebagaimana pada Lampiran 5.

Berikut adalah data penerima karyawan per 30 Juni 2024.

Tabel 26 Rincian Data Karyawan

TAHUN	PROGRAM			
	PHRD	JUMLAH	RM	JUMLAH
2020			S3DN	3
2021	S2DN Tematik	22		
	S2DN Afirmasi	25		
2022			SSMP	17
			S2DN Afirmasi	28
			S2DN Tematik	25
2023	S2DN Afirmasi	30		
	S2DN	201		
	S2LP	72		
	S2LN	5		
			SSMP	15
			S2DN CS	15
			S3DN	3
		Partially Funded	16	
	JUMLAH 1	355	JUMLAH 3	122
	TOTAL 1+2+3		477	

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00

C.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Satker	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Bappenas	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pengembalian kelebihan belanja pegawai yang akan disetorkan melalui pemotongan secara langsung atas gaji. Pada Semester I TA 2024 semua pengembalian belanja pegawai yang melalui mekanisme pemotongan gaji sudah terbayarkan seluruhnya sehingga saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima senilai Rp0,00.

Rincian atas Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan pada lampiran 6.

Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Satker	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Bappenas	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Nilai Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada periode Semester I TA 2024 sebesar Rp0,00 karena tidak ada jasa yang belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Bukan Pajak dan perhitungannya disajikan pada lampiran 7.

C.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak
Rp0,00*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Perbandingan Rincian Penyisihan Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Perbandingan Rincian Penyisihan Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Satker	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Bappenas	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,00

C.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebagai berikut:

Tabel 31 Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Satker	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Bappenas	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih – BL
TGR/TGR Rp(0,00)

C.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – BL TGR/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – BL TGR/TGR per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Perbandingan rincian penyisihan piutang tidak tertagih BL/ TGR adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Perbandingan Piutang Tidak Tertagih-BL TGR/TGR per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tabel 33 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-BL TGR/TGR per 30 Juni 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur

Persediaan
Rp6.450.337.596,00

C.9. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6.450.337.596,00 dan Rp5.351.083.434,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Perbandingan Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Barang Konsumsi	6.290.859.695	5.207.588.626	20,80
Bahan untuk Pemeliharaan	60.866.589	47.352.645	28,54
Suku Cadang	84.738.118	86.255.821	(1,76)
Pita Cukai, Materai & Leges	-	-	-
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Hewan dan Tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Bahan Baku	-	-	-
Persediaan Lainnya	13.873.194	9.886.342	40,33
Jumlah	6.450.337.596	5.351.083.434	20,54

Penjelasan mutasi persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Mutasi Persediaan

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5.351.083.434,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian	2.400.187.006
Hasil Opname Fisik Lebih	-
Reklasifikasi Masuk	70.956.829
Koreksi Nilai Bertambah	2.198.400
Mutasi Kurang:	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	-
Habis Pakai	(1.289.319.144)
Reklasifikasi Keluar	(72.226.829)
Koreksi Kuantitas Kurang	(2.198.400)
Hasil Opname Fisik Kurang	(10.343.700)
Saldo per 30 Juni 2024	6.450.337.596

Saldo akhir persediaan merupakan gabungan dari Laporan Barang Persediaan atas 36 (tiga puluh enam) Satuan Kerja. Khusus untuk Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas, nilai persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) pada Aplikasi SAKTI dari 23 (dua puluh tiga) Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pembantu Kuasa Pengguna Barang (sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat).

Satuan kerja yang masih memiliki saldo persediaan per 30 Juni 2024 yaitu:

Tabel 36 Saldo Persediaan pada Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Saldo
Bappenas	6.382.617.230
Bappeda Provinsi Maluku	112.000
Bappeda Provinsi Gorontalo	6.065.500
Bappeda Provinsi Papua Barat	43.014.191
MWA MCAI II	500.000
MWA ICCTF	18.028.675
Total	6.450.337.596

C.9.I. Barang Konsumsi

Saldo Barang Konsumsi per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6.300.456.195,00 dan Rp5.207.588.626,00 dan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Mutasi Barang Konsumsi

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5.207.588.626
Mutasi Tambah:	
Pembelian	2.373.115.095
Reklasifikasi Masuk	68.456.829
Koreksi Nilai Bertambah	2.198.400
Total	2.443.770.324
Mutasi Kurang:	
Habis Pakai	(1.283.207.726)
Reklasifikasi Keluar	(64.749.429)
Hasil Opname Fisik Kurang	(747.200)
Koreksi Kuantitas Kurang	(2.198.400)
Total	(1.350.902.755)
Saldo per 30 Juni 2024	6.300.456.195

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan persediaan barang konsumsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan, antara lain berupa pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat tulis kantor lainnya, tinta/toner printer, bahan komputer, obat - obatan dan lain – lain.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Reklasifikasi Masuk merupakan transaksi pencatatan persediaan barang konsumsi yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi persediaan yang lain. Reklasifikasi masuk barang konsumsi antara lain adalah alat tulis kantor, alat perekat, kertas hvs dan berbagai kertas, tinta/toner printer, bahan komputer, batu baterai, dan materai.
3. Koreksi Nilai Bertambah merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan adanya koreksi nilai berkurang atas kesalahan pencatatan BAST atas kertas HVS pada satuan kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.

Mutasi kurang:

1. Habis Pakai merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan barang konsumsi pada periode berjalan. Sebagian besar pemakaian terjadi pada alat tulis kantor, alat perekat, kertas hvs dan berbagai kertas, barang cetakan, tinta/toner printer, bahan komputer, lampu listrik, batu baterai, materai, obat – obatan, dan lain – lain.
2. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus persediaan barang konsumsi untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru, antara lain berupa alat tulis kantor, mouse, amplop, tinta/toner, dan lain – lain.
3. Hasil Opname Fisik Kurang merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan hasil opname fisik yang berlebih pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku.
4. Koreksi Nilai Berkurang merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan adanya koreksi nilai berkurang atas kesalahan pencatatan BAST atas kertas HVS pada satuan kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.

C.9.2. Bahan untuk Pemeliharaan

Saldo Bahan untuk Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp60.866.589,00 dan Rp47.352.645,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Mutasi Bahan untuk Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	47.352.645
Mutasi tambah:	
Pembelian	13.513.944
Total	13.513.944
Mutasi Kurang:	
-	-
Total	-
Saldo per 30 Juni 2024	60.866.589

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan persediaan bahan untuk pemeliharaan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan, antara lain pembelian alat – alat pel dan lap, kunci, kran dan semprotan, alat pengikat, bahan kimia untuk pembersih, alat makan minum, pengharum ruangan, dan perabot kantor lainnya.

C.9.3. Suku Cadang

Saldo Suku Cadang per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing- masing adalah sebesar Rp84.738.118,00 dan Rp86.255.821,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Mutasi Suku Cadang

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	86.255.821
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.539.237
Mutasi Kurang:	
Habis Pakai	(3.056.940)
Saldo per 30 Juni 2024	84.738.118

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan persediaan suku cadang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas berupa pembelian alat – alat kedokteran gigi.

Mutasi kurang:

1. Pemakaian merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan suku cadang pada periode berjalan, yaitu antara lain pemakaian pada alat – alat kedokteran gigi pada Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.

C.9.4. Pita Cukai, Materai dan Leges

Saldo Pita Cukai, Materai dan Leges per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Mutasi Pita Cukai, Materai dan Leges

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	4.741.500
Reklasifikasi Masuk	2.500.000
Mutasi Kurang :	
Habis Pakai	(1.044.000)
Reklasifikasi Keluar	(6.197.500)
Saldo per 30 Juni 2024	-

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan persediaan pita cukai, materai dan leges yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN pada periode berjalan, yaitu antara lain pembelian materai sebagai keperluan perkantoran serta sebagai penampung pada Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas dan Satuan Kerja Dekonsentrasi.
2. Reklasifikasi Masuk merupakan transaksi pencatatan persediaan pita cukai, materai dan leges yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi persediaan yang lain pada Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Mutasi kurang:

1. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus persediaan pita cukai, materai dan leges untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru, antara lain berupa materai.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Habis Pakai merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan pita cukai, materai dan leges pada Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas dan Satuan Kerja Dekonsentrasi.

C.9.5. Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Mutasi Tanah dan Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Penyerahan kepada Masyarakat	-
Saldo per 30 Juni 2024	-

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

C.9.6. Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 42 Mutasi Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Penyerahan kepada Masyarakat	-
Saldo per 30 Juni 2024	-

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

C.9.7. Peralatan Dan Mesin Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Mutasi Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah :	
Total	-
Mutasi Kurang :	
Total	-
Saldo per 30 Juni 2024	-

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

C.9.8. Aset Lain-Lain untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Aset Lain-lain untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Mutasi Aset Lain-lain untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Penyerahan kepada Masyarakat	-
Saldo per 30 Juni 2024	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

C.9.1. Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Mutasi Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Total	-
Mutasi Kurang:	
Total	-
Saldo per 30 Juni 2024	-

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

C.9.2. Bahan Baku

Saldo Bahan Baku per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 46 Mutasi Bahan Baku

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	9.900
Total	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	(9.900)
Total	-
Saldo per 30 Juni 2024	-

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan bahan baku yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN pada periode berjalan, yaitu antara lain pembelian karung pada Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Mutasi kurang:

1. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus bahan baku untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru, antara lain berupa karung.

C.9.3. Persediaan Lainnya

Saldo Persediaan Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp13.873.194,00 dan Rp9.886.342,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47 Mutasi Persediaan Lainnya

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	9.886.342
Mutasi tambah:	
Pembelian	5.997.330
Total	5.997.330
Mutasi Kurang:	
Habis Pakai	(2.010.478)
Total	(2.010.478)
Saldo per 30 Juni 2024	13.873.194

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan persediaan lainnya yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN pada periode berjalan, yaitu antara lain pembelian obat cair dan obat lainnya.

Mutasi kurang:

1. Habis Pakai merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan lainnya pada periode berjalan, antara lain berupa obat cair dan obat lainnya.

Rincian Persediaan disajikan pada lampiran 8 dan 9.

Tanah
Rp1.541.450.676.000,00

C.10. Tanah

Tanah yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.541.450.676.000,00 dan Rp1.541.450.676.000,00. Berikut tabel perbandingan aset tetap tanah tahun 2024 dan tahun 2023:

Tabel 48 Perbandingan Tanah per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	1.541.450.676.000	1.541.450.676.000	-
Jumlah	1.541.450.676.000	1.541.450.676.000	-

Luas tanah per 30 Juni 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI seluas 84.452 m², berdasarkan Hasil Inventarisasi seluas 84.099 m² dan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai seluas 149.730 m². Perbedaan luasan data di SAKTI dengan hasil inventarisasi karena data SAKTI bersumber dari hasil Inventarisasi dan Penilaian tahun 2007, Kemudian tahun 2016/2017 dilakukan inventarisasi ulang kembali dan ditemukan perbedaan yg diantaranya disebabkan karena:

1. Ada pemecahan sertifikat dari pegawai/mantan pegawai tanpa mengurangi sertifikat induk
2. Luasan SHM berbeda dengan SK golongan III

Data hasil inventarisasi tanah tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Lampiran 9 Laporan Barang Milik Negara.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Mutasi Aset Tetap Berupa Tanah

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.541.450.676.000
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per 30 Juni 2024	1.541.450.676.000

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset tanah di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Saldo Tanah per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

NO	LUAS (M2)		NAMA BARANG	NOMOR ASET	NILAI	LOKASI
	HASIL INVENTARIS	SAKTI				
1	12.000	12.000	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	13	58.011.750.000	Jati Sari, Bekasi
2	203	135	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	2.135.019.000	Buncit PLK XI, Jakarta Selatan
3	172	70	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2	1.073.111.000	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan
4	160	160	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	8	401.508.000	Sawangan, Depok
5	28.172	28.172	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	134.318.726.000	Jati Sampurna, Bekasi
6	208	306	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	12	764.787.000	Sawangan, Depok
7	160	160	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	10	401.508.000	Sawangan, Depok
8	160	160	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	9	401.508.000	Sawangan, Depok
9	140	140	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	11	35.113.900	Sawangan, Depok
10	2.035	2.205	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	6	10.077.234.000	Jati Sampurna, Bekasi
11	27.022	27.022	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	125.785.408.000	Jati Sari, Bekasi
12	523	523	Tanah Bangunan Gudang	1	10.019.755.000	Tawakal Ujung Grogol, Jakarta, Barat
13	2.334	2.334	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	216.186.750.000	Madiun No. 4-6, Jakarta Pusat
14	846	846	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	78.380.843.000	Sunda Kelapa No. 9, Jakarta Pusat
15	726	726	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	43.630.422.000	Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat
16	678	678	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9	62.783.648.000	Madiun No. 2, Jakarta Pusat
17	2.905	2.905	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	267.764.744.000	Taman Suropati No. 2A, Jakarta Pusat
18	4.218	4.218	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	390.692.250.000	Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat
19	1.437	1.437	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	134.433.146.000	Taman Suropati No. 1, Jakarta Pusat
20	-	255	Tanah Bangunan Balai Sidang/ Pertemuan	1	3.837.240.000	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan
TOTAL					1.541.450.676.000	

Per 30 Juni 2024 pada Kementerian PPN/Bappenas terdapat aset tetap berupa tanah dengan status Hak Pakai yang berlokasi di Jatisari dan Jatisampurna yang telah dimanfaatkan untuk perumahan pegawai dan sedang dalam proses persetujuan pemindahtanganan.

Terhadap status tanah di Jatisari dan Jatisampurna tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan surat kepada Kementerian Keuangan namun belum mendapatkan tanggapan.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Adapun koordinasi dan surat yang dimaksud yaitu:

1. Surat dari Menteri PPN/Bappenas kepada Menteri Keuangan Nomor B.446/M.PPN/SES/PL.08/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 hal usulan pemindahtanganan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Surat dari Kepala Biro Umum kepada Menteri Keuangan Nomor 2681/B.05/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 hal permohonan penetapan status dan penyampaian kelengkapan dokumen pemindahtanganan tanah kavling Jatisari dan Jatisampurna; dan
3. Surat dari Kepala Biro Umum kepada Menteri Keuangan Nomor 6729/B.05/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 hal penyampaian kelengkapan dokumen pemindahtanganan tanah kavling Jatisari dan Jatisampurna.
4. Surat dari Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 10173/PL.08.01/ SES/B/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan dan Persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa Tanah di Jatisari dan Jatisampurna, Bekasi.
5. Surat dari Kepala Biro Umum kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor 16854/PL.05.01/ B.05/T/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 hal Penyampaian Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Tim Pengadaan Perumahan Pegawai Bappenas.
6. Surat Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 00419/PL.08.01/ SES/T/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 hal Permohonan Informasi Progres Persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa Tanah Negara di Jatisari dan Jatisampurna Bekasi.
7. Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B. 318 /M.PPN/SES/ PL.08.01/04/2022 tanggal 18 April 2022 hal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa Tanah Kavling di Jatisari dan Jatisampurna, Bekasi.
8. Surat Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. 10103/PL.08.01/SES/B/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 hal Permohonan Informasi Progres Persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa Tanah Negara di Jatisari dan Jatisampurna Bekasi.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Pertemuan/Audiensi dengan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara pada tanggal 21 Februari 2023 membahas progress persetujuan pemindahtanganan BMN berupa Tanah Negara di Jatisampuran dan Jatisari, Bekasi.
- Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada tanggal 10 Mei 2023 yang dihadiri oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Rincian Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2024 disajikan pada lampiran 9.

Peralatan dan Mesin
Rp596.213.399.344,00

C. II. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp596.213.399.344,00 dan Rp589.235.925.861,00. Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Perbandingan Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	596.213.399.344	589.235.925.861	1,18
Jumlah	596.213.399.344	589.235.925.861	1,18

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 52 Mutasi Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023		589.235.925.861
Mutasi tambah:		7.680.990.331
Pembelian		7.329.735.261
Reklasifikasi Masuk		69.261.000
Perolehan Lainnya		67.559.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)		45.462.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah		5.579.870
Hibah Masuk		163.393.200
Mutasi kurang:		(703.516.848)
Reklasifikasi Keluar		(69.261.000)
Transfer Keluar		(630.905.848)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang		(3.350.000)
Saldo per 30 Juni 2024		596.213.399.344
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024		(503.760.065.361)
Nilai Buku per 30 Juni 2024		92.453.333.983

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan peralatan dan mesin yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF dan Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas pada periode berjalan, antara lain berupa pembelian dan instalasi Video Monitor pada Gedung Pusbindiklatren, pembelian Sepeda Motor Listrik, *Handy Talky*, *Note book*, kursi besi/metal, alat kantor lainnya, *external portable/harddisk*, peralatan personal komputer, dan lain-lain.
2. Reklasifikasi Masuk merupakan transaksi koreksi atas pencatatan peralatan dan mesin yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain menjadi klasifikasi BMN yang seharusnya, antara lain berupa Monitor, *keyboard* (Peralatan Personal Komputer), lemari *camera*, *note book*, dan peralatan personal komputer lainnya.
3. Perolehan Lainnya merupakan transaksi perolehan yang tidak termasuk pada transaksi-transaksi perolehan di atas yaitu perolehan atas penggantian 7 (dua) unit BMN hilang berupa *Note Book*, 1 (satu) unit BMN hilang berupa *telephone mobile* dan penambahan unit atas kesalahan input transaksi pembelian oleh operator modul komitmen pada periode berjalan yaitu berupa *wireless access point*.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) merupakan transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) peralatan dan mesin yang memenuhi kapitalisasi aset yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan, antara lain berupa penambahan pada *P.C Unit, note book*, sepeda motor listrik, dan personal komputer lainnya.
5. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai dan/atau kuantitas peralatan dan mesin dikarenakan adanya kesalahan pembukuan pada nilai/kuantitas, yaitu berupa *Video Conference, External/Portable Hardisk*, dan alat kantor lainnya.
6. Hibah Masuk merupakan transaksi perolehan peralatan dan mesin yang berasal dari kegiatan proyek kerjasama teknis: pembiayaan energi untuk rendah karbon – fasilitas bantuan perkotaan (FELICITY) dan proyek *Strengthening Capacities for Policy Planning for the Implementation of the 2030 Agenda and in the Global South (SDGs SSTC)* dari GIZ melalui Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas pada periode berjalan, antara lain berupa *note book, P.C. unit, telephone mobile*, dan lain – lain.

Mutasi kurang:

1. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai dan/atau kuantitas peralatan dan mesin dikarenakan adanya kesalahan pembukuan pada nilai/kuantitas, yaitu berupa *wireless access point*.
2. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus peralatan dan mesin untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru, antara lain berupa LCD Monitor, *microphone, P.C. unit*, lensa kamera, personal komputer lainnya.
3. Transfer Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi mencatat penyerahan BMN berupa kursi besi/metal, kursi kayu, *sice*, lemari besi/metal, filling cabinet besi, dan lain – lain yang masih aktif kepada Satuan Kerja Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2024 disajikan pada lampiran 9.

Gedung dan Bangunan
Rp170.720.539.389,00

C.12. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp170.720.539.389,00 dan Rp168.981.619.282,00.

Perbandingan rincian Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 53 Perbandingan Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	170.720.539.389	168.981.619.282	1,03
Jumlah	170.720.539.389	168.981.619.282	1,03

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Mutasi Transaksi Terhadap Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	168.981.619.282
Mutasi tambah :	1.738.920.107
Pembelian	810.540.700
Pengembangan Nilai Aset	928.379.407
Mutasi kurang :	-
Saldo per 30 Juni 2024	170.720.539.389
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(55.849.613.996)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	114.870.925.393

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan Gedung dan bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas pada periode berjalan, antara lain berupa Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Taman Suropati (Gedung Madiun Lt.6).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Pengembangan Nilai Aset merupakan transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) gedung dan bangunan yang memenuhi kapitalisasi aset yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan, antara lain berupa rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Bappenas di Jalan Taman Suropati.

Tidak terdapat mutasi kurang pada Gedung dan Bangunan di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 9.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp15.101.617.672,00

C.13. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.101.617.672,00 dan Rp15.101.617.672,00 dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Satker Bappenas	15.101.617.672	15.101.617.672	0,00
Jumlah	15.101.617.672	15.101.617.672	0,00

Tabel 56 Mutasi Transaksi Terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	15.101.617.672
Mutasi tambah:	0
Mutasi Kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2024	15.101.617.672
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(7.439.303.266)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	7.662.314.406

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 9.

Aset Tetap Lainnya
Rp106.714.670.717,00

C.14. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp106.714.670.717,00 dan Rp106.635.470.717,00. Perbandingan rincian aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 57 Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	30 JUNI 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN)%
Satker Bappenas	106.628.251.362	106.549.051.362	0,07
Satker MWA ICCTF	86.419.355	86.419.355	0,00
Jumlah	106.714.670.717	106.635.470.717	0,07

Tabel 58 Rincian Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Aset Tetap Renovasi	102.137.312.437		102.137.312.437
2	Aset Tetap Lainnya	4.577.358.280	23.587.500	4.553.770.780
	Jumlah	106.714.670.717	23.587.500	106.691.083.217

Tabel 59 Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	106.635.470.717
Mutasi tambah:	79.200.000
Pembelian	10.300.000
Pengembangan nilai aset	68.900.000
Mutasi Kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	106.714.670.717
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(23.587.500)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	106.691.083.217

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi perolehan aset tetap lainnya yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas pada periode berjalan, antara lain berupa pembelian koleksi lukisan kanvas untuk Gedung kantor Kantor Sekretariat PMO Transformasi Ekonomi Kerthi Bali (TEKB).
2. Pengembangan nilai aset merupakan transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) aset tetap dalam renovasi yang menambah nilai buku sebelumnya berupa pekerjaan rehabilitasi ruang kerja pusdatinrenbang Kementerian PPN/Bappenas di gedung sewa Menara Bappenas Kuningan.

Tidak terdapat mutase kurang pas Aset Tetap Lainnya di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 9.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Rp2.094.938.300
,00

C.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.094.938.300,00 dan Rp2.094.938.300,00. Perbandingan rincian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah sebagai berikut.

Tabel 60 Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Satker Bappenas	2.094.938.300	2.094.938.300	0%
Jumlah	2.094.938.300	2.094.938.300	0%

Tabel 61 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024		0
Mutasi tambah		
Total		
Mutasi kurang		
Total		-
Saldo per 30 Juni 2024		-

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran 9.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(567.072.570.123,00)*

C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(567.072.570.123,00) dan Rp(530.318.848.347,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024.

Tabel 62 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah	1.541.450.676.000	-	1.541.450.676.000
2	Peralatan dan Mesin	596.213.399.344	(503.760.065.361)	92.453.333.983
3	Gedung dan Bangunan	170.720.539.389	(55.849.613.996)	114.870.925.393
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.101.617.672	(7.439.303.266)	7.662.314.406
5	Aset Tetap Lainnya	106.714.670.717	(23.587.500)	106.691.083.217
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.094.938.300	-	2.094.938.300
Jumlah		2.432.295.841.422	(567.072.570.123,00)	1.865.223.271.299

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran 9.

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/ TGR)
Rp0,00

C.17. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Rp(0,00)

C.18. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(0,00) dan Rp(0,00).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Rp490.209.375.000,00

C.19. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp490.209.375,00 dan Rp490.209.375,00. Perbandingan Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Perbandingan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	490.209.375.000	490.209.375.000	-
Jumlah	490.209.375.000	490.209.375.000	-

Tidak terdapat peningkatan saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan nilai tanah milik Kementerian PPN/Bappenas yang digunakan untuk mendirikan gedung perkantoran berdasarkan perjanjian *Built, Operating and Transfer* (BOT) dengan PT. Bakrie Swasakti Utama. Setelah perjanjian BOT selesai, Aset Tanah akan direklasifikasi kembali menjadi Aset Tetap.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jangka waktu hak pengelolaan Wisma Bakrie oleh PT. Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung mulai 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2029 sesuai Perjanjian Bangun Guna Serah/ *Built, Operate, and Transfer* (BOT) Tanah dan Gedung Bappenas Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, nomor 4300/SES/09/2004 tanggal 24 Desember 2004.

Aset Tak Berwujud
Rp126.571.852.362,00

C.20. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp126.571.852.362,00 dan Rp126.559.710.365,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Perbandingan Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	125.763.921.903	125.751.779.906	0,01
ICCTF	807.930.459	807.930.459	0,00
Jumlah	126.571.852.362	126.559.710.365	0,01

Tabel 65 Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	Software	43.302.108.015	(33.724.544.224)	9.577.563.791
2	Lisensi	13.270.100.347	(2.948.557.075)	10.321.543.272
3	HasilKajian/Penelitian	69.999.644.000	-	69.999.644.000
	Jumlah	126.571.852.362	(36.673.101.299)	89.898.751.063

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

Tabel 66 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	126.559.710.365
Mutasi tambah	12.141.997
Pembelian	6.421.997
Hibah Masuk	5.720.000
Mutasi keluar	-
Saldo per 30 Juni 2024	126.571.852.362
Akumulasi Amortisasi s.d 30 Juni 2024	(36.673.101.299)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	89.898.751.063

Mutasi tambah:

1. Pembelian merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan perolehan atas aset tak berwujud atas pengadaan berupa lisensi *ProPresenter 7 Seat License*.
2. Hibah Masuk merupakan transaksi perolehan peralatan dan mesin yang berasal dari kegiatan proyek *Strengthening Capacities for Policy Planning for the Implementation of the 2030 Agenda and in the Global South* (SDGs SSTC) dari GIZ melalui Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas pada periode berjalan, antara lain berupa *software computer Windows 10 Pro 64bit OEM*.

Tidak terdapat mutase kurang pada aset tak berwujud di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian Aset Tetap Tak Berwujud disajikan pada lampiran 9.

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Rp0,00

C.21. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 67 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah	-
Mutasi kurang	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan disajikan pada lampiran 9.

*Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp0,00*

C.22. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0.00 dan Rp20.068.813.422,00. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima.

Pengajuan pembayaran/ pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima. Rincian RPATA yang dibayarkan Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada lampiran 11

Aset Lain-Lain
Rp65.360.312.237,00

C.23. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp65.360.312.237,00 dan Rp65.360.312.237,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian PPN/ Bappenas serta dalam proses penghapusan dari BMN. Perbandingan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 68 Perbandingan Aset Lain-Lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	65.360.312.237	65.360.312.237	0,00
Jumlah	65.360.312.237	65.360.312.237	0,00

Tabel 69 Rincian Aset Lain-lain per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	62.102.399.189	(2.379.703.911)	59.722.695.278
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3.257.913.048	(3.257.913.048)	0
	Jumlah	65.360.312.237	(5.637.616.959)	59.722.695.278

Adapun mutasi aset lainnya yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Mutasi Aset Lain-lain

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	65.360.312.237
Mutasi tambah	-
Mutasi kurang	-
Saldo per 30 Juni 2024	65.360.312.237
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Juni 2024	(5.637.616.959)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	59.722.695.278

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Aset Lain-lain di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 30 Juni 2024.

Per 30 Juni 2024 terdapat BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah berupa Rumah Negara Golongan III beserta Tanahnya atas nama Bapak Budiono yang telah terbit Sertifikat Hak Milik dan belum dilakukan penghapusan dikarenakan Kementerian PPN/Bappenas belum mendapat tanggapan dari Kementerian Keuangan atas surat Nomor B-09871/PL.08/B.05/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Golongan III. Selain itu, terdapat BMN hilang yang telah dihentikan penggunaannya dan dalam proses penyelesaian kerugian negara sebagaimana SK Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor KEP. 73/SES/HK/06/2023 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) tanggal 14 Juni 2023 serta Perubahannya nomor KEP. 83/SES/HK/07/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku disajikan pada lampiran 9.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp
(42.310.718.258,00)

C.24. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(42.310.718.258,00) dan Rp(37.561.500.283,00). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 71 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/ AMORTISASI	NILAI BUKU
A	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490.209.375.000	-	490.209.375.000
B	Aset Tak Berwujud			
1	Software	43.302.108.015	(33.724.544.224)	9.577.563.791
2	Lisensi	13.270.100.347	(2.948.557.075)	10.321.543.272
3	Hasil Kajian/Penelitian	69.999.644.000	-	69.999.644.000
	Jumlah	126.571.852.362	(36.673.101.299)	89.898.751.063
C	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-
D	Aset Lain-Lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	62.102.399.189	(2.379.703.911)	59.722.695.278
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3.257.913.048	(3.257.913.048)	-
	Jumlah	65.360.312.237	(5.637.616.959)	59.722.695.278
	Total	682.141.539.599	-42.310.718.258	639.830.821.341

Rincian akumulasi amortisasi aset tak berwujud disajikan pada lampiran 9.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp45.745.271.219,00

C.25. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp45.745.271.219,00 dan Rp37.784.214.832,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Perbandingan rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 72 Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	15.690.136.257	3.565.129.909	340,10
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	24.013.318.582	15.513.334.503	54,79
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	766.986.407	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	5.274.829.973	18.705.750.420	-
Jumlah	45.745.271.219	37.784.214.832	21,07

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari belanja yang sudah dibebankan (sudah dicatat SPby) namun belum dilakukan proses pembayaran (SPP) serta belanja tercatat SPP namun belum terbit SP2D.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada lampiran 11.

*Utang yang
belum ditagihkan
Rp7.846.707.102,00*

C.26. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.846.707.102,00 dan Rp0,00. Saldo utang yang belum ditagihkan berasal dari transaksi-transaksi yang telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Surat Perintah Bayar (SPBy) tetapi belum diadministrasikan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

*Hibah Belum Disahkan
Rp25.997.869.040,00*

C.27. Hibah yang Belum Disahkan

Saldo Hibah yang Belum Disahkan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp25.997.869.040,00 dan Rp0,00.

Rincian kegiatan hibah dan nilai yang belum disahkan disajikan sebagai berikut:

Tabel 73 Rincian Kegiatan Hibah dan Nilai yang belum disahkan per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Hibah	Jenis Hibah	Nomor Register	Saldo
1	Hibah Kas UNICEF	Kas	2QXCZN3A	3.657.476.372
2	Hibah Kas UNFPA	Kas	2L4S726A	2.315.023.265
4	Public Administration Programme for Green Economy Development in Indonesia - Singapore Cooperation Enterprise (SCE)	Jasa	2DTA67BA	2.444.123.318
6	Indonesia Australia Partnership for Infrastructure Facility (KIAT) - DFAT	Jasa	2FR4C6KA	17.581.246.085
Jumlah				25.997.869.040

Rincian saldo hibah langsung yang belum disahkan dapat dilihat pada lampiran 2 untuk hibah langsung uang.

C.28. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp130.709.323,00 dan Rp104.417.264,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Perbandingan Pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut:

Pendapatan Diterima di Muka
Rp130.709.323,00

Tabel 74 Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Bappenas	130.709.323	104.417.264	25,18
Jumlah	130.709.323	104.417.264	25,18

Rincian Pendapatan Diterima di Muka disajikan pada lampiran 12.

C.29. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp6.205.590.320,00

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.205.590.320,00 dan Rp84.294.315,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Perbandingan Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Tabel 75 Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Satuan Kerja	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
1	Bappenas	4.200.000.000	84.294.315	4.882,54
2	Bappeda Provinsi Jawa Barat	27.000.000	-	-
3	Bappeda Provinsi Jawa Tengah	30.000.000	-	-
4	Bappeda Provinsi DIY	50.000.000	-	-
5	Bappeda Provinsi Aceh	91.120.000	-	-
6	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	50.000.000	-	-
7	Bappeda Provinsi Riau	50.000.000	-	-
8	Bappeda Provinsi Jambi	20.000.000	-	-
9	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	50.000.000	-	-
10	Bappeda Provinsi Lampung	60.000.000	-	-
11	Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	50.000.000	-	-
12	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	50.000.000	-	-
13	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	50.000.000	-	-
14	Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	40.000.000	-	-
15	Bappeda Provinsi Maluku	211.136.000	-	-
16	Bappeda Provinsi Bali	20.000.000	-	-
17	Bappeda Prov. Nusa Tenggara Barat	20.000.000	-	-
18	Bappeda Provinsi Papua	20.000.000	-	-
19	Bappeda Provinsi Bengkulu	60.000.000	-	-
20	Bappeda Provinsi Banten	18.000.000	-	-
21	Bappeda Litbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.000.000	-	-
22	Bappeda Provinsi Gorontalo	25.000.000	-	-
23	Bappeda Litbang Provinsi Kepulauan Riau	146.840.000	-	-
24	Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	36.672.320	-	-
25	Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara	20.000.000	-	-
26	MWA MCAI II	90.000.000	-	-
27	MWA ICCTF	669.822.000	-	-
Jumlah		6.205.590.320	84.294.315	4.882,54

C.30. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.130.888,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan dan utang jangka pendek lainnya.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp3.130.888,00

Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 76 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Bappeda Provinsi Lampung	1.117.500	-	-
Bappeda Provinsi Bali	78.388	-	-
Bappeda Provinsi Bengkulu	1.935.000	-	-
Jumlah	3.130.888	-	-

Ekuitas
Rp2.463.302.181.605,00

C.31. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.463.302.181.605,00 dan Rp2.545.529.802.447,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
Lainnya
Rp82.097.852,00

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya

Jumlah PNBP Lainnya pada Kementerian PPN/Bappenas untuk periode yang berakhir pada tanggal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp82.097.852,00 dan Rp80.100.501,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77 Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	59.499.941	80.100.500	(25,72)
Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	-	-	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	22.587.911	-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	10.000	1	-
Jumlah	82.097.852	80.100.501	2,49

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode tahun anggaran 2024 berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa pembayaran sewa atas koperasi pegawai bappenas, ATM BNI, dan alat edukasi penukaran botol plastik jadi uang; Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang berasal dari denda atas penyelesaian pekerjaan rehabilitasi ruang kantor Gedung Madiun Lantai 6; dan Pendapatan Anggaran Lain-lain yang berasal dari kelebihan setor TUP dari PPK PPN XI.

Tabel 78 Perbandingan PNBP Lainnya pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selisih
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	258.195.000	(258.195.000)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	59.499.941	85.792.000	(26.292.059)
Pendapatan dari Bangun, Guna dan Serah (BGS)	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	22.587.911	22.587.911	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	87.015.335	(87.015.335)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.673.589.031	(1.673.589.031)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	237.792.984	(237.792.984)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	10.000	10.000	-
Jumlah	82.097.852	2.364.982.261	(2.282.884.409)

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 79 Selisih nilai PNBP Lainnya pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo PNBP - LRA	2.364.982.261
Penambah:	
-	-
Jumlah Penambah	-
Pengurang:	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	(258.195.000)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	(26.292.059)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(87.015.335)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(1.673.589.031)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(237.792.984)
Jumlah Pengurang	(2.282.884.409)
Total Tambah/Kurang	(2.282.884.409)
Saldo PNBP - LO	82.097.852

Selisih PNBP Lainnya pada LO dan LRA disebabkan oleh penjualan peralatan dan mesin tahun lalu yang terealisasi pada tahun berjalan; pengakuan akrual pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah, gedung, dan bangunan; serta penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp128.376.606.062,00 dan Rp92.706.813.962,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80 Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	27.823.241.987	27.379.225.850	1,62
Beban Pembulatan Gaji	394.965	385.704	2,40
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	2.013.122.940	1.938.051.842	3,87
Beban Tunjangan Anak PNS	453.214.382	444.707.080	1,91
Beban Tunjangan Struktural PNS	1.996.185.000	1.809.915.000	10,29
Beban Tunjangan Fungsional PNS	4.936.182.000	5.157.005.000	(4,28)
Beban Tunjangan PPh PNS	838.235.529	394.925.349	112,25
Beban Tunjangan Beras PNS	1.251.490.020	1.322.968.560	(5,40)
Beban Uang Makan PNS	1.438.924.000	1.660.907.000	(13,37)
Beban Tunjangan Umum PNS	172.090.000	286.365.000	(39,91)
Beban Gaji Pokok PPPK	4.247.637.000	26.698.500	15809,65
Beban Pembulatan Gaji PPPK	63.996	372	17103,23
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.625.700	2.669.850	148,17
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.325.140	533.970	148,17
Beban Tunjangan Struktural PPPK	22.000.000	0	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	708.144.000	4.680.000	15031,28
Beban Tunjangan Beras PPPK	98.925.720	1.955.340	4959,26
Beban Uang Makan PPPK	142.656.000	2.442.000	5741,77
Beban Uang Lembur	15.785.000	5.761.000	174,00
Beban Uang Lembur PPPK	0	-	-
Beban Pegawai TK/Kegiatan	73.423.837.816	52.240.486.847	40,55
Beban Pegawai TK/Kegiatan/Kinerja PPPK	8.794.278.572	35.452.423	24705,86
Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Pegawai	128.384.359.767	92.715.136.687	38,47
Pengembalian	(7.753.705)	(8.322.725)	(6,84)
Jumlah	128.376.606.062	92.706.813.962	38,48

Beban pegawai pada Semester I TA 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Kenaikan utamanya diantaranya disebabkan oleh kenaikan *rate* tunjangan kinerja untuk Periode Semester I TA 2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih menggunakan *rate* lama. Selain itu, kenaikan juga disebabkan karena adanya penerimaan pegawai PPPK pada tahun 2024 sebanyak 328 pegawai sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.010A/M.PPN/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Nomor KEP.013/M.PPN/03/2024 tanggal 29 Maret 2024.

Tabel 81 Selisih Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	27.823.241.987	24.785.566.150	3.037.675.837
Beban Pembulatan Gaji	394.965	361.955	33.010
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	2.013.122.940	1.792.269.000	220.853.940
Beban Tunjangan Anak PNS	453.214.382	401.486.136	51.728.246
Beban Tunjangan Struktural PNS	1.996.185.000	1.776.535.000	219.650.000
Beban Tunjangan Fungsional PNS	4.936.182.000	4.405.968.000	530.214.000
Beban Tunjangan PPh PNS	838.235.529	812.499.622	25.735.907
Beban Tunjangan Beras PNS	1.251.490.020	1.112.009.100	139.480.920
Beban Uang Makan PNS	1.438.924.000	1.438.924.000	-
Beban Tunjangan Umum PNS	172.090.000	154.385.000	17.705.000
Beban Gaji Pokok PPPK	4.247.637.000	4.240.152.000	7.485.000,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	63.996	63.859	137
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.625.700	5.877.200	748.500
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.325.140	1.175.440	149.700
Beban Tunjangan Struktural PPPK	22.000.000	16.500.000	5.500.000
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	708.144.000	707.624.000	520.000
Beban Tunjangan Beras PPPK	98.925.720	98.491.200	434.520
Beban Uang Makan PPPK	142.656.000	142.656.000	-
Beban Uang Lembur	15.785.000	14.720.000	1.065.000
Beban Uang Lembur PPPK	-	-	-
Beban Pegawai TK/Kegiatan	73.423.837.816	67.654.607.946	5.769.229.870
Beban Pegawai TK/Kegiatan/Kinerja PPPK	8.794.278.572	6.697.170.324	2.097.108.248
Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti	-	-	-
Jumlah Beban Pegawai	128.384.359.767	116.259.041.932	12.125.317.835
Pengembalian	(7.753.705)	(7.753.705)	-
Jumlah Beban Pegawai	128.376.606.062	116.251.288.227	12.125.317.835

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 82 Selisih Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Pegawai - LRA	116.251.288.227
Penambah:	
Beban Gaji Pokok PNS	3.037.675.837
Beban Pembulatan Gaji	33.010
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	220.853.940
Beban Tunjangan Anak PNS	51.728.246
Beban Tunjangan Struktural PNS	219.650.000
Beban Tunjangan Fungsional PNS	530.214.000
Beban Tunjangan PPh PNS	25.735.907
Beban Tunjangan Beras PNS	139.480.920
Beban Tunjangan Umum PNS	17.705.000
Beban Gaji Pokok PPPK	7.485.000
Beban Pembulatan Gaji PPPK	137
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	748.500
Beban Tunjangan Anak PPPK	149.700
Beban Tunjangan Struktural PPPK	5.500.000
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	520.000
Beban Tunjangan Beras PPPK	434.520
Beban Uang Lembur	1.065.000
Beban Pegawai TK/Kegiatan	5.769.229.870
Beban Pegawai TK/Kegiatan/Kinerja PPPK	2.097.108.248
Jumlah Penambah	12.125.317.835,00
Pengurang:	
-	-
Jumlah Pengurang	0
Total Tambah/Kurang	12.125.317.835
Saldo Beban Pegawai - LO	128.376.606.062

Selisih nilai penambah dari LO dan LRA disebabkan oleh belanja pegawai yang telah tercatat SPP namun belum terbit SP2D per 30 Juni 2024, sedangkan selisih pengurang dari LO dan LRA disebabkan oleh pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan tahun sebelumnya yang baru dibayarkan pada tahun 2024.

Beban Persediaan
Rp1.295.561.904,00

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.295.561.904,00 dan Rp2.275.575.941,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.293.551.426	2.274.717.991	(0,43)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	2.010.478	857.950	1,34
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Jumlah	1.295.561.904	2.275.575.941	(0,43)

Penurunan beban persediaan utamanya disebabkan karena penurunan pemakaian beban persediaan konsumsi di periode Semester I TA 2024. Perbandingan Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 84 Perbandingan Rincian Beban Persediaan pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Persediaan Konsumsi	1.293.551.426	1.975.200.443	(681.649.017)
Beban Persediaan Lainnya	2.010.478	-	2.010.478
Jumlah	1.295.561.904	1.975.200.443	(679.638.539)

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 85 Selisih nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Persediaan - LRA	1.975.200.443
Penambah:	
Beban Persediaan Lainnya	2.010.478
Jumlah Penambah	2.010.478
Pengurang:	
Beban Persediaan Konsumsi	(681.649.017)
Jumlah Pengurang	(681.649.017)
Total Tambah/Kurang	(679.638.539)
Saldo Beban Persediaan - LO	1.295.561.904

Saldo LRA pada beban persediaan mencerminkan nilai pembelian persediaan sedangkan saldo LO mencerminkan nilai pemakaian atau pembebanan dari persediaan. Sehingga selisih LRA dan LO pada beban persediaan disebabkan oleh pembelian persediaan yang belum dilakukan pemakaian atau pembebanan oleh unit kerja.

*Beban Barang dan Jasa
Rp740.534.147.345,00*

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp740.534.147.345,00 dan Rp672.909.104.451,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas. Perbandingan rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 86 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	21.214.924.374	22.587.656.820	(6,08)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.153.785	20.316.800	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.578.500	17.398.000	(67,94)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.131.975.000	1.589.371.000	(28,78)
Beban Barang Operasional Lainnya	10.801.981.645	9.486.678.117	13,86
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.649.526.794	(100,00)
Beban Bahan	15.578.169.091	13.129.289.265	18,65
Beban Honor Output Kegiatan	1.832.085.000	3.976.050.000	(53,92)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	14.413.941.689	8.138.026.489	77,12
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	-	213.333.332	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	10.954.435	9.137.384	19,89
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	-	-	-
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	-	-	-
Beban Air, Listrik, Telepon	4.572.216.210	3.920.594.425	16,62
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	667.189.858	844.802.645	(21,02)
Beban Jasa Pos dan Giro	361.200	665.000	(45,68)
Beban Jasa Konsultan	372.806.644.681	364.819.996.211	2,19
Beban Sewa	128.602.173.673	143.012.188.454	(10,08)
Beban Jasa Profesi	6.644.116.500	6.101.104.500	8,90
Beban Jasa Lainnya	162.248.295.504	91.267.810.222	77,77
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2.117.472.194	(100,00)
Beban Barang Non Operasioal- Penanganan Pandemi	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	1.400.000	16.860.124	-
Jumlah Beban	740.538.161.145	672.918.277.776	10,05
Pengembalian	(4.013.800)	(9.173.325)	-
Jumlah	740.534.147.345	672.909.104.451	10,05

Kenaikan beban barang dan jasa utamanya disebabkan oleh kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya dan Beban Barang Operasional Lainnya.

Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya utamanya disebabkan adanya pembayaran biaya pendidikan mahasiswa dan pelatihan oleh PPK PPN X. Adapun Kenaikan Beban Barang Operasional Lainnya utamanya disebabkan adanya pekerjaan pengelolaan unit sewa gedung wisma bakrie 2. Selain itu kenaikan juga terjadi pada Beban Air, Listrik, dan Telepon; Beban Jasa Lainnya; dan Beban Jasa Konsultan.

Tabel 87 Perbandingan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	21.214.924.374	19.580.365.703	1.634.558.671
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.153.785	6.153.785	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.578.500	47.600.500	(42.022.000)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.131.975.000	1.095.065.000	36.910.000,00
Beban Barang Operasional Lainnya	10.801.981.645	10.709.013.112	92.968.533
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0
Beban Bahan	15.578.169.091	15.965.735.462	(387.566.371)
Beban Honor Output Kegiatan	1.832.085.000	1.770.449.000	61.636.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	14.413.941.689	14.259.840.252	154.101.437
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	10.954.435	8.028.225	2.926.210
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	-	-	-
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	-	-	-
Beban Air, Listrik, Telepon	4.572.216.210	4.607.545.102	(35.328.892)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	667.189.858	665.456.038	1.733.820
Beban Jasa Pos dan Giro	361.200	361.200	-
Beban Jasa Konsultan	372.806.644.681	42.672.015.337	330.134.629.344
Beban Sewa	128.602.173.673	132.225.984.035	(3.623.810.362)
Beban Jasa Profesi	6.644.116.500	6.239.266.500	404.850.000
Beban Jasa Lainnya	162.248.295.504	153.585.520.856	8.662.774.648
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.400.000	-	1.400.000
Jumlah Beban	740.538.161.145	403.438.400.107	337.099.761.038
Pengembalian	(4.013.800)	(4.013.800)	0
Jumlah	740.534.147.345	403.434.386.307	337.099.761.038

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 88 Selisih nilai Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Barang dan Jasa - LRA	403.434.386.307
Penambah:	
Beban Keperluan Perkantoran	1.634.558.671
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	36.910.000
Beban Barang Operasional Lainnya	92.968.533
Beban Honor Output Kegiatan	61.636.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	154.101.437
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2.926.210
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.733.820
Beban Jasa Konsultan	330.134.629.344
Beban Jasa Profesi	404.850.000
Beban Jasa Lainnya	8.662.774.648
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	1.400.000
Jumlah Penambah	341.188.488.663
Pengurang:	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	(42.022.000)
Beban Bahan	(387.566.371)
Beban Air, Listrik, Telepon	(35.328.892)
Beban Sewa	(3.623.810.362)
Jumlah Pengurang	(4.088.727.625)
Total Tambah/Kurang	337.099.761.038
Saldo Beban Barang dan Jasa - LO	740.534.147.345

Secara umum perbedaan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA pada selisih penambah disebabkan karena pencatatan transaksi jasa konsultan yang bersumber dari hibah langsung jasa serta transaksi belanja yang masih harus dibayar (sudah dilakukan pencatatan SPBy namun belum diproses SP2D). Sedangkan pada selisih pengurang disebabkan oleh tagihan yang telah dilakukan pembebanan namun belum terbayarkan dan jurnal penyesuaian atas karyawan yang belum dilakukan jurnal balik.

Beban
Pemeliharaan
Rp14.856.465.238,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.856.465.238,00 dan Rp16.297.561.195,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.546.697.512	6.290.476.567	4,07
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	222.325.196	9.583.714.283	(97,68)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.068.763.631	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.621.959	1.836.000	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	188.194.058	(100,00)
Beban Persediaan Suku Cadang	3.056.940	233.340.287	(98,69)
Jumlah Beban	14.856.465.238	16.297.561.195	(8,84)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	14.856.465.238	16.297.561.195	(8,84)

Penurunan Beban Pemeliharaan di tahun anggaran 2024 utamanya disebabkan karena penurunan Beban Asuransi Gedung dan Bangunan akibat dari penurunan nilai buku gedung. Selain itu juga disebabkan penurunan pada Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan Beban Persediaan Suku Cadang.

Perbandingan antara saldo Beban Pemeliharaan pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 90 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.546.697.512	6.502.167.112	44.530.400
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	222.325.196	222.325.196	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.068.763.631	8.061.266.716	7.496.915,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.621.959	15.621.959	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	3.056.940	-	3.056.940
Jumlah Beban	14.856.465.238	14.801.380.983	55.084.255
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	14.856.465.238	14.801.380.983	55.084.255

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 91 Selisih Nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Pemeliharaan - LRA	14.801.380.983
Penambah:	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.530.400
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.496.915
Beban Persediaan Suku Cadang	3.056.940
Jumlah Penambah	55.084.255
Pengurang:	
-	-
Jumlah Pengurang	0
Total Tambah/Kurang	55.084.255
Saldo Beban Pemeliharaan - LO	14.856.465.238

Perbedaan Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA disebabkan karena terdapat pembebanan pemakaian persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang yang berasal dari belanja barang konsumsi.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp148.697.966.901,00 dan Rp154.485.209.560,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	54.906.529.701	35.321.223.597	55,45
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	563.835.800	352.629.020	59,89
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.467.416.005	10.758.621.704	155,31
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	50.860.535.595	33.083.884.099	53,73
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	14.508.485.800	7.323.306.165	98,11
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	487.427.100	1.588.120.843	(69,31)
Jumlah Beban	148.794.230.001	88.427.785.428	68,27
Pengembalian	(96.263.100)	(25.071.334)	-
Jumlah	148.697.966.901	88.402.714.094	68,21

Beban perjalanan dinas mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang paling signifikan disebabkan karena kenaikan pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota akibat adanya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta. Selain itu kenaikan juga terjadi pada beban perjalanan dinas secara umum akibat dari meningkatnya jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2024 dibanding dengan periode yang sama di tahun 2023.

Adapun perbandingan antara saldo Beban Perjalanan Dinas pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 93 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selish
Beban Perjalanan Biasa	54.906.529.701	52.846.693.471	2.059.836.230
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	563.835.800	531.480.800	32.355.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.467.416.005	25.791.780.690	1.675.635.315
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	50.860.535.595	49.964.768.423	895.767.172
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	14.508.485.800	17.152.761.635	(2.644.275.835)
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	487.427.100	487.427.100	-
Jumlah Beban	148.794.230.001	146.774.912.119	2.019.317.882
Pengembalian	(96.263.100)	(96.263.100)	-
Jumlah	148.697.966.901	146.678.649.019	2.019.317.882

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 94 Selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Perjalanan Dinas - LRA	146.678.649.019
Penambah:	
Beban Perjalanan Biasa	2.059.836.230
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.355.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.675.635.315
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	895.767.172
Jumlah Penambah	4.663.593.717
Pengurang:	
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	(2.644.275.835)
Jumlah Pengurang	(2.644.275.835)
Total Tambah/Kurang	2.019.317.882
Saldo Beban Perjalanan Dinas - LO	148.697.966.901

Selisih penambah pada perbedaan saldo Belanja Perjalanan Dinas LRA dan LO disebabkan oleh belanja perjalanan dinas yang telah dicatatkan pembebanannya (SPBy) namun belum terealisasi pembayarannya. Sedangkan selisih pengurang berasal dari tagihan tahun lalu yang terealisasi pembayarannya di tahun 2024.

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp2.314.000,00*

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.314.000,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	1.044.000	-	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.270.000	-	-
Jumlah Beban	2.314.000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	2.314.000,00	-	-

Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat muncul akibat dari kesalahan penggunaan kode barang yang sudah habis pakai pada Satker Dana Dekonsentrasi Bappeda Provinsi Maluku, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, dan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilakukan koreksi pembebanan pada periode pelaporan keuangan selanjutnya.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp42.120.608.199,00*

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp42.120.608.199,00 dan Rp48.651.538.363,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	31.270.920.230	39.450.723.392	(20,73)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.509.123.705	4.153.174.280	8,57
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.585.449.414	156.678.642	911,91
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.896.875	24.670.206	(76,10)
Beban Amortisasi Software	4.056.669.689	5.896.875	68693,55
Beban Amortisasi Lisensi	661.641.888	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	-	2.999.537.963	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	30.906.398	1.860.857.005	(98,34)
Jumlah	42.120.608.199	48.651.538.363	(13,42)

Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi disebabkan karena terdapat penjualan aset peralatan dan mesin dan penghapusan aset tetap yang tidak digunakan dalam pemerintah sehingga beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp 0,00

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp258.195.000,00

D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan pelepasan aset non lancar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp258.195.000,00 dan Rp166.888.888,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	258.195.000	166.888.888	54,71
Jumlah	258.195.000	166.888.888	54,71

Kenaikan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari realisasi penjualan atas peralatan dan mesin melalui lelang di Jatisari, Bekasi.

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 99 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selisih
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	258.195.000	258.195.000	-
Jumlah	258.195.000	258.195.000	-

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp0,00

D.II. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban dari pelepasan aset non lancar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp177.201.926,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 100 Realisasi Beban Pelepasan Aset Non Lancar

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	177.201.926	(100,00)
Jumlah	-	177.201.926	(100,00)

Tabel 101 Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar antara LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selish
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tidak terdapat Beban Kerugian Pelepasan Aset pada periode Semester I TA 2024.

D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional
Rp4.546.644.888,00

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp4.546.644.888,00 dan Rp1.718.082.082,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	87.015.335	1.575.458.881	(94,48)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.208.356.729	126.969.929	851,69
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	150.502.984	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	10.410.840	1.121.432	828,35
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	67.559.000	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.022.800.000	15.012.840	20.034,76
Jumlah	4.546.644.888	1.718.563.082	164,56

Kenaikan pada akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disebabkan kenaikan yang signifikan pada Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan Pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 103 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selisih
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	70.000.000	(70.000.000)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	87.015.335	1.896.041.640	(1.809.026.305)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.208.356.729	1.783.483.544	(575.126.815)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	150.502.984	131.264.352	19.238.632
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	10.410.840	-	10.410.840
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	67.559.000	-	67.559.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.022.800.000	-	3.022.800.000
Jumlah	4.546.644.888	3.880.789.536	665.855.352

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 104 Selisih Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

(Dalam Rupiah)

Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LRA	3.880.789.536
Penambah:	
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	19.238.632
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	10.410.840
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	67.559.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.022.800.000
Jumlah Penambah	3.120.008.472
Pengurang:	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	(70.000.000)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(1.809.026.305)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(575.126.815)
Jumlah Pengurang	(2.454.153.120)
Total Tambah/Kurang	665.855.352
Saldo Beban Persediaan - LO	4.546.644.888

Perbedaan saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya antara LO dan LRA utamanya disebabkan karena pencatatan pendapatan penyesuaian nilai persediaan yang hanya tercatat dari sisi akrual.

Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp3.090.768.128,00

D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp3.090.768.128,00 dan Rp408.564,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	3.022.800.000	-	-
Beban Persediaan Rusak/Usang	-	-	-
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	67.968.128	408.564	16535,86
Jumlah	3.090.768.128	408.564	756395,46

Kenaikan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disebabkan karena kenaikan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan.

Tabel 106 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya antara LO dan LRA per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	3.022.800.000	-	3.022.800.000
Beban Persediaan Rusak/Usang	-	-	-
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	67.968.128	-	67.968.128
Jumlah	3.022.800.000	-	3.022.800.000

Perbedaan Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya antara LO dan LRA berasal dari beban penyesuaian nilai persediaan dan beban kerugian selisih kurs belum terealisasi. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya meliputi akun yang bersifat akrual sehingga tidak muncul pada LRA.

D.14. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Pos Luar Biasa
Rp0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp2.545.577.515.239,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp2.545.577.515.239,00 dan Rp2.570.191.931.718,00

Defisit LO
Rp(1.074.087.500.037,00)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah (*Defisit*) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(1.074.087.500.037,00) dan Rp(985.537.861.491,00).

*Koreksi yang menambah/
mengurangi ekuitas*
Rp2.229.870,00

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.229.870,00 dan Rp21.846.464,00. Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari:

Tabel 107 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

(Dalam Rupiah)

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	Nilai
Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-
Penyesuaian Nilai Aset	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi atas Reklasifikasi	-
Selisih Revaluasi Aset	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	2.229.870
Koreksi Lain-lain	-
Jumlah	2.229.870

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Selisih Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan muncul akibat adanya transaksi perubahan nilai persediaan dikarenakan adanya kesalahan pembukuan. Berikut merupakan rincian Koreksi Nilai Persediaan per Satker:

Tabel 108 Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per Satker

(Dalam Rupiah)

No.	Satker	Nilai
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	-
Jumlah		-

Koreksi atas
Reklasifikasi
Rp0,00)

E.3.3. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi atas reklasifikasi merupakan transaksi yang muncul akibat proses koreksi atas aset yang sudah direklasifikasi akibat kesalahan penggunaan akun. Nilai tersebut berasal dari Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.

Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0,00

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp2.229.870,00

E.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.229.870,00 dan Rp21.846.464,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari:

Tabel 109 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	Nilai
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.229.870
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	2.229.870

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per Satker terdiri dari:

Tabel 110 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	2.290.870
2	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	-
	Jumlah	2.290.870

Koreksi Lain-Lain
Rp0,00

E.4. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 111 Rincian Koreksi Lain-Lain Berdasarkan Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	-
2	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	-
	Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp991.809.936.533,00

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp991.809.936.533,00 dan Rp830.351.071.254,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 112 Transaksi Antar Entitas

(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	691.600.950.237
Diterima Dari Entitas Lain	(2.364.982.261)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	(13.237.400)
Pengesahan Hibah Langsung	302.587.205.957
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	991.809.936.533

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp691.600.950.237,00

Diterima dari Entitas
Lain
Rp(2.364.982.261,00)

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan Bendahara Umum Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DKEL sebesar Rp691.600.950.237,00 sedangkan DDEL sebesar Rp(2.364.982.261,00). Rincian DKEL per Satker terdiri dari:

Tabel 113 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per Satker

(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	666.763.381.573
Bappeda Provinsi Jawa Barat	140.172.000
Bappeda Provinsi Jawa Tengah	826.645.100
Bappeda Provinsi DIY	198.023.310
Bappeda Provinsi Aceh	177.965.933
Bappeda Provinsi Sumatera Barat	480.310.369
Bappelitbang Provinsi Riau	505.092.401
Bappeda Provinsi Jambi	677.722.079
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	861.474.809
Bappeda Provinsi Lampung	580.316.350
Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	328.739.010
Bappelitbang Provinsi Kalimantan Tengah	158.952.503
Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	520.944.280
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	21.300.000
Bappeda Provinsi Sulawesi Utara	700.148.811
Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	435.905.736
Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	474.682.900
Bappeda Provinsi Maluku	471.283.793
Bappeda Provinsi Bali	516.250.882
Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat	385.176.038
Bappelitbang Provinsi Nusa Tenggara Timur	690.746.388
Bappeda Provinsi Papua	19.440.000
Bappeda Provinsi Bengkulu	609.644.530
Bappeda Provinsi Maluku Utara	83.819.322
Bappeda Provinsi Banten	84.678.000
Bappelitbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	257.334.363
Bappeda Provinsi Gorontalo	772.798.777
Bappelitbang Provinsi Kepulauan Riau	141.515.510
Bappeda Provinsi Papua Barat	604.719.650
Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	600.201.062
Bappelitbang Kalimantan Utara	639.238.724
Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia II (MWA MCAI II)	4.185.749.890
Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	7.686.576.144
Jumlah	691.600.950.237

Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker terdiri dari:

Tabel 114 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No.	Satker	Nilai
1	Kementerian PPN/Bappenas	(2.321.321.316)
2	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	-
3	Bappeda Provinsi Bali	-
4	Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau	-
5	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	(43.660.945)
Jumlah		(2.364.982.261)

Nilai DKEL sebesar Rp691.600.950.237,00 berasal dari seluruh transaksi belanja yang telah terbit SP2D dikurangi pengembaliannya SSPB. Sedangkan nilai DDEL sebesar Rp(2.364.982.261,00) merupakan seluruh setoran penerimaan ke Bendahara Umum Negara melalui setoran SSBP.

*Transfer Masuk
Rp0,00*

*Transfer Keluar
Rp(13.237.400)*

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk/transfer keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp(13.237.400,00).

Rincian Transfer Keluar diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 115 Rincian Transfer Keluar per Satker

(Dalam Rupiah)

No.	Transaksi Antar Entitas	Nilai
1.	Kementerian PPN/Bappenas	13.237.400
2.	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	-
Jumlah		13.237.400

Nilai Transfer Keluar sebesar Rp13.237.400 merupakan:

1. Transfer keluar atas transaksi penyerahan BMN berupa kursi besi/metal, kursi kayu, sice, lemari besi/metal, filling cabinet besi, dan lain – lain yang masih aktif kepada Satuan Kerja Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta.

*Pengesahan Hibah
Langsung
Rp302.587.205.957,00*

*Pengesahan
Pengembalian Hibah
Langsung Rp(0,00)*

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp302.587.205.957,00 sedangkan untuk Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp(0,00).

Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 116 Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker

(Dalam Rupiah)

No.	Transaksi Antar Entitas	Nilai
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	302.587.205.957
2	MWA ICCTF	-
Jumlah		302.587.205.957

Berikut merupakan daftar hibah langsung yang sudah disahkan hingga periode Juni 2024:

Tabel 117 Daftar Hibah Langsung Sudah Disahkan per 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

No	No Register	Kegiatan Donor	Jenis Hibah	No. MPH/ SPHL	Nominal
1	27BMXZ9A	Sinergid dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) - DFAT	Hibah Jasa	814854139884237000	9.142.865.300
2	29JPW1VA	Australia - Indonesia Partnership Justice Phase II (AIP J II) - DFAT	Hibah Jasa	815265648890443896	4.038.591.447
3	25AMMFAA	The Field Support Services Project (FSS) - GAC	Hibah Jasa	815996349900281174	3.898.220.098
4	2L4S726A	Program Kerjasama RI-UNFPA Siklus 10 (2021-2025) - UNFPA	Hibah Jasa	816694701910472599	1.370.826.074
5	74900201	Australia Indonesia Partnership for Promoting Rural Income through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA) - DFAT	Hubah Barang	816409961905913794	67.020.501.727
6	2ANAKPPA	ASEAN Regional Support - Indonesia Trade Related Assistance (ARISE Plus-Indonesia) - Trade Support Facility (TSF)	Hibah Jasa	816694814910472597	33.648.952.521
7	2222HFHA	Innovation and Investment for Inclusive and Sustainable Economic Development (ISED) Phase II - GIZ	Hibah Jasa	816887729912324872	17.046.696.916
8	22SGC7WA	Australia - Indonesia Partnership Toward Inclusive Society (AIP TIS)/ Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI)	Hibah Jasa	816887877912324871	158.010.900.116
9	22JAP1VA	Strengthening Capacities for Policy Planning for The Implementation of The 2030 Agenda in Indonesia and in The Global South (SDGs SSTC) - GIZ	Hibah Barang	817641319923313086	112.350.900
10	24SE93SA	Financing Energy for Low Carbon Investment - Cities Advisory Facility(Felicity) in Indonesia	Hibah Jasa	817775260925145000	8.240.538.558
9	24SE93SA	Financing Energy for Low Carbon Investment - Cities Advisory Facility(Felicity) in Indonesia	Hibah Barang	817775296925145646	56.762.300
TOTAL					302.587.205.957

Sedangkan untuk rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung adalah sebagai berikut.

Tabel 118 Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per Satker

(Dalam Rupiah)

No.	Transaksi Antar Entitas	Nilai
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	-
2	Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	-
Jumlah		-

Ekuitas Akhir
Rp2.463.302.181.605,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.463.261.075.605,00 dan Rp2.415.026.987.945,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Pengungkapan Lain-lain

F.1. Pengungkapan Lain-lain

Selain data keuangan yang telah diungkapkan diatas, terdapat beberapa informasi terkait data keuangan dan non keuangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 Kementerian PPN/Bappenas disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Keuangan yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
2. Satuan Kerja Menteri PPN/Bappenas pada Semester I TA 2024 melakukan revisi DIPA (termasuk revisi administrasi) sebanyak 5 (lima) kali, Revisi DIPA dilakukan karena:
 - a. Revisi blokir anggaran Automatic Adjustment (AA);
 - b. Revisi penyelesaian tunggakan, revisi antar jenis belanja, revisi antar kegiatan/KRO/RO, revisi Hal III DIPA;
 - c. Revisi administrasi Hal III DIPA
 - d. Revisi penambahan PHLN, revisi antar kegiatan, revisi antar jenis belanja;
 - e. Revisi administrasi Hal III DIPA.

F.2. Sertifikasi PPK dan Bendahara

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sejumlah 16 PPK TA 2024 pada Satker Bappenas, 1 PPK Satker MWA ICCTF, 1 PPK Satker MWA MCAI II dan 3 PPK pada Satker Dana Dekonsentrasi telah memiliki sertifikat kompetensi.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 12 Bendahara TA 2024 pada Satker Bappenas, 1 Bendahara pada Satker ICCTF dan 28 Bendahara pada Satker Dana Dekonsentrasi telah memiliki sertifikat kompetensi.

F.3. Rekening Pemerintah

Dalam penyelenggaraan Bagian Anggaran 055, satuan kerja pusat memiliki 1 (satu) rekening Bendahara Pengeluaran dan 23 rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yang digunakan dan dipertahankan sedangkan pada satuan kerja Dekonsentrasi memiliki 33 rekening Bendahara Pengeluaran yang digunakan dan dipertahankan. Pada satker ICCTF dan satker MCAI II masing-masing memiliki 1 (satu) rekening Bendahara Pengeluaran yang digunakan dan dipertahankan.

F.4. Transaksi Resiprokal

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara satker pemberi kerja-belanja dengan satker penerima kerja-pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Pada Semester I TA 2024, di Kementerian PPN/Bappenas terdapat transaksi resiprokal berupa:

No.	Kode Satker	Nama Satker <i>Intraco</i>	Nilai (Rp)	Keterangan
1	677515	Universitas Jenderal Soedirman	212.811.000,00	Pembayaran Kerjasama Penguatan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
Total			Rp212.811.000,00	

Atas transaksi resiprokal masih timbul selisih pada Monitoring di aplikasi MonSAKTI karena perbedaan periode pencatatan belanja pada Bappenas dan pencatatan pendapatan pada Universitas Jenderal Soedirman. Adapun atas perbedaan periode pencatatan tersebut tidak berpengaruh terhadap saldo Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas.

F.5. Tuntutan Hukum

Terdapat satu tuntutan hukum Pasca Kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 yang telah memiliki hukum tetap (*inkracht*) yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 No: 318/PDT.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Mei 2015 No:116/PDT/2015/PT.DKI jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 1950/Pdt/2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 2019 Nomor 451 PK/Pdt/2019 terkait Penanganan Pengungsi Kerusakan Maluku, sebagai berikut:

Data Tuntutan Hukum Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)

No	Kementerian/ Lembaga	Nomor Perkara dan Deskripsi Perkara	Penggugat	Aanmaning	Upaya Hukum Lanjutan/ Luar Biasa	Gugatan			Penganggaran/ DIPA	Keterangan
						Rupiah	Valas	Tanah/ Bangunan		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Kementerian PPN/ Bappenas	No. Perkara 451PK/ PDT/2019 Pokok gugatan: Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benda materil dan immateriil pasca kerusakan Maluku-Maluku Utara tahun 1999	Penggugat: 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Gubernur M aluku Utara 3. Menteri Keuangan 4. Kepala Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Maluku 5. Gubernur Maluku 6. Gubernur Sulawesi Tenggara 7. Menteri Perencanaan Pemabngunan Nasional/ BAPPENAS 8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 9. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 10. Kepala Kantor Perwakilan Propinsi Maluku Utara 11. Presiden RI 12. Menteri Sosial 13. Kepala Kantor Perwakilan Pemda Sulawesi Tenggara 14. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian			394.451.450.000	-	-	0,00	1. Tuntutan ini belum dianggarkan ke dalam DIPA sehingga belum dilakukan pencatatan atas utang. 2. Sudah diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun perkembangan lanjutan atas status tuntutan hukum sebagaimana pada penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat disposisi Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3241/D.7/2023 Perihal Permohonan Pembayaran Ganti Rugi eks Pengungsi, Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) telah mengirimkan surat Kepada Presiden yang secara garis besar adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan eksekusi anggaran atau keputusan Presiden tentang penyaluran dana ganti rugi eks pengungsi;
 - b. Menetapkan Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) sebagai penyalur dana Penggugat sebesar Rp3.944.514.500.000,00 (tiga triliun Sembilan ratus empat puluh empat miliar lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Menetapkan mekanisme penyaluran eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara dari rekening YPKKM Penyalur sebagai perpanjangan tangan Kuasa Hukum Penggugat pada Bank: BNI, BRI, serta Kantor Pos dan Giro akan disalurkan langsung kepada setiap wakil Penggugat dan seluruh anggota kelompok penggugat seluruhnya tiap Kepala Keluarga (KK) sebagaimana sudah diuraikan dalam salinan Putusan Mahkamah Agung RI.
2. Sebelum dibentuknya Tim Panel Penyelesaian Ganti Rugi Pengungsi Kerusakan Maluku tersebut, maka proses penyelesaian ganti rugi tidak dapat dilaksanakan dan putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi. Namun demikian, saat ini penganggaran dan nilai Ganti Rugi dimaksud ditanggung renteng dan dibagi rata serta dibebankan kepada seluruh Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana tercantum dalam Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum Kementerian Keuangan (sepateuh.kemenkeu.go.id).
3. Berdasarkan data per tanggal 18 Desember 2023 pada Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dibebani tanggungan pembayaran ganti rugi sebesar Rp394.451.450.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh rupiah).

F.6. Barang Hilang

Merujuk pada Berita Acara Kesepakatan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 01/BA/TGRBMN/11/2023 bahwa penggantian BMN yang hilang berupa barang dengan merk/tipe yang sama. Sampai dengan tahun Semester I TA 2024, terdapat

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BMN hilang sebanyak 8 (delapan) unit yang telah diganti oleh pengguna barang dan dicatat pada Aplikasi SAKTI. Sedangkan 3 (tiga) unit lainnya berupa note book NUP 1774 serta telephone mobile NUP 733 dan 913 masih belum dilakukan penggantian. Rincian atas BMN hilang tersebut sebagai berikut:

No	Nama Barang	NUP	Merk/Tipe	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan
1	Note Book	2753	Dell Latitude 7310 + Ms. Office	28/12/2020	34.375.000
2	Note Book	2038	HP Probook 430 G7	11/05/2020	26.365.000
3	Note Book	2351	HP Probook 430 G7	05/06/2020	27.090.000
4	Note Book	3199	Dell Latitude 7310 + Ms. Office	13/07/2021	35.040.336
5	Note Book	1371	HP NB 240 G6 i7 + Ms Office	14/03/2019	20.106.800
6	Note Book	1774	HP ProBook 440 G6	18/12/2019	23.517.500
7	Note Book	1543	Macbook Pro MV972ID	05/12/2019	32.500.000
8	Telephone Mobile	476	Iphone 13 Pro Max 128GB	07/12/2022	19.945.500
9	Telephone Mobile	733	Iphone 13 128GB	07/12/2022	14.945.500
10	Note Book	2716	Dell Latitude 7310 + Charger + Mouse + Adapter	28/12/2020	34.375.000
11	Telephone Mobile	913	Iphone 13 128GB Midnight	07/12/2022	14.945.500

F.7. Kontrak Payung Terintegrasi Bersyarat Expo Osaka

World Expo 2025 Osaka, yang diselenggarakan oleh *Bureau International des Expositions* (BIE), berfokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) dengan tema "*Designing Future Society for Our Lives*". Indonesia berpartisipasi dalam ajang ini untuk menunjukkan komitmennya terhadap TPB/SDGs dan Visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor 269 Tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai *Responsible National Authority (RNA)* yang bertanggung jawab atas persiapan dan penyelenggaraan partisipasi Indonesia di World Expo 2025 Osaka. Dalam Kesempatan ini, Indonesia akan membangun Paviliun tipe A (*Self Built Pavilion*) pada zona *Connecting Lives*, yang diharapkan akan mempromosikan berbagai inovasi masyarakat Indonesia yang beragam dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pekerjaan World Expo 2025 dilaksanakan oleh penyedia jasa *event organizer* dengan ruang lingkup antara lain pekerjaan perencanaan (*desain dan building permit*), pembangunan (konstruksi), pelaksanaan (pengelolaan paviliun Indonesia) dan pembongkaran paviliun Indonesia. Penyelenggaraan Kegiatan Partisipasi Indonesia pada Expo 2025 di Osaka dilaksanakan melalui Kontrak Payung Terintegrasi Bersyarat dengan Penyedia PT. Samudera Dyan Praga sesuai Kontrak Nomor 305/SPK/01.01.03/LB/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana telah diubah dengan Adendum Kontrak Nomor 011/SPK/06.20.03/LB/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 dengan jangka waktu pekerjaan sejak tahun 2023 – 2026.

Total biaya yang dialokasikan untuk kegiatan ini senilai Rp790.130.245.500 (tujuh ratus sembilan puluh miliar seratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dan dibebankan kepada DIPA Kementerian PPN/Bappenas pada Tahun Anggaran 2023 – 2026. Adapun Kontrak pekerjaan pada masing – masing tahun akan diatur dalam Kontrak Pelaksanaan. Pekerjaan tahun 2023 adalah desain paviliun Indonesia pada Expo 2025 di Osaka sesuai dengan kontrak pelaksanaan Nomor 202/SPK/01.01.03/LB/08/2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum Kedua Nomor 173/ADD/SPK/01.01.03/LB/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan ruang lingkup pekerjaan yaitu:

- a. Pembuatan, pengembangan konsep, dan desain paviliun Indonesia;
- b. Pembuatan situs resmi (*website*) paviliun Indonesia;
- c. Pendampingan teknis pengembangan konsep dan desain paviliun, perhitungan struktur, pembuatan DED dan BoQ berstandar Jepang untuk kebutuhan perizinan, pembuatan timeline Pembangunan paviliun Indonesia oleh rekanan Jepang.

Total anggaran untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp13.688.153.191 (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 100%.

Selanjutnya, pada tahun 2024 terdapat beberapa pekerjaan yang telah dan akan diselenggarakan, antara lain :

- a. Desain Paviliun Indonesia : Pengurusan Lanjutan Perizinan Pembangunan Paviliun Indonesia pada Expo 2025 di Osaka

Izin pembangunan paviliun Indonesia direncanakan akan diterbitkan pada akhir tahun 2023 sebagai bagian dari Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Desain Paviliun Indonesia Pada *Expo* 2025 di Osaka (Kontrak Pelaksanaan Desain TA 2023). Namun dalam prosesnya, terjadi hambatan terkait kebijakan pengajuan desain yang disyaratkan oleh Pemerintah Jepang. Hal ini berimplikasi terhadap jadwal pelaksanaan pengajuan dan perolehan izin pembangunan paviliun hingga tahun 2024. Kondisi serupa juga dialami oleh negara peserta lainnya dalam hal proses perizinan pembangunan Paviliun. Upaya proaktif Indonesia telah dilakukan dengan melakukan pengajuan (*submissions*) dokumen pengurusan perizinan pembangunan paviliun Indonesia kepada Komite *Expo* pada tanggal 14 Desember 2023. Hal ini merupakan langkah awal dalam proses perizinan pembangunan. Proses perizinan pembangunan Paviliun Indonesia belum mencapai tahap finalisasi dan membutuhkan tindak lanjut dari proses perizinan pembangunan Paviliun Indonesia. Maka dari itu, diperlukan beberapa upaya tindak lanjut koordinasi yang sistematis serta penyesuaian desain Paviliun Indonesia yang terukur untuk memenuhi seluruh persyaratan dan mendapatkan izin pembangunan (*building permit*) untuk Paviliun Indonesia.

Pekerjaan ini memiliki maksud dan tujuan untuk melengkapi serta memenuhi semua persyaratan perizinan pembangunan secara komprehensif dan terstruktur, sehingga diperoleh sertifikat izin mendirikan bangunan (*building permit*) yang sah dan legal dari Komite *Expo* 2025 Osaka sebagai prasyarat untuk memulai konstruksi. Kegiatan pengurusan lanjutan perizinan ini penting dilakukan untuk memastikan :

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) kepatuhan terhadap regulasi dan norma yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan Paviliun Indonesia;
- 2) kelancaran dan kesuksesan pembangunan Paviliun Indonesia;
- 3) meminimalisir risiko dan potensi hambatan;
- 4) memastikan kualitas dan keamanan konstruksi Paviliun Indonesia;
- 5) memperkuat kerjasama dan koordinasi.

Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Februari s.d. 10 Mei 2024 lalu berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Nomor 012/SPK/06.20.03/LB/02/2024 tanggal 2 Februari 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum Kedua Kontrak Pelaksanaan Nomor 283/ADD/SPK/06.20.03/LB/04/2024 tanggal 29 April 2024 dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Penyedia Jasa harus membangun komunikasi dan koordinasi intensif dengan Rekanan Jepang, Prefektur Osaka dan Komite Expo 2025 Osaka dalam urusan penerbitan izin pembangunan Paviliun Indonesia;
- 2) Penyedia Jasa melakukan finalisasi desain akhir (*final design*) Paviliun Indonesia sesuai dengan persyaratan dan regulasi perizinan di Jepang;
- 3) Penyedia Jasa mempersiapkan dan mengajukan dokumen permohonan perizinan untuk memperoleh sertifikat izin bangunan sementara (*Temporary Building Permit*) Paviliun Indonesia kepada otorita terkait di Jepang dan Komite Expo 2025 Osaka;
- 4) Penyedia Jasa mempersiapkan dan mengajukan dokumen permohonan perizinan untuk memperoleh sertifikat izin pembangunan (*Temporary Building Permit*) Paviliun Indonesia kepada otorita terkait di Jepang dan Komite Expo 2025 Osaka.

Total biaya pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 1.637.304.803,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu delapan ratus tiga Rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran 100% (seratus persen).

- a. Pengelolaan Paviliun Indonesia : Penyelenggaraan *Unveiling Design* Paviliun Indonesia pada Expo 2025 di Osaka

Unveiling design Paviliun memiliki makna filosofis yang mendalam. *Unveiling design* tidak hanya menjadi simbol fisik peresmian pembangunan, tetapi juga merepresentasikan awal dari suatu perjalanan yang penuh makna dan harapan. Seperti dalam filosofi *Javanese*, 'Sugeng Rawuh', yang berarti 'selamat datang', *unveiling design* Paviliun Indonesia menjadi perwujudan penyambutan kepada para pengunjung Expo 2025 Osaka dengan keramahan dan kehangatan budaya Indonesia. Melampaui dari makna simbolik, *unveiling design* beserta *handover ceremony* menjadi momen simbolis dalam siklus pembangunan, menandai langkah awal yang sarat dengan harapan, semangat inovasi, dan perubahan positif. Hal ini juga mencerminkan filosofi "Gotong Royong", semangat kolaborasi dan gotong royong masyarakat Indonesia, di mana berbagai pihak berpartisipasi dalam membangun sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, mewakili semangat bersama dalam meraih tujuan bersama demi kesejahteraan bersama. Maka dari itu, kegiatan *Unveiling design* Paviliun tidak hanya merupakan seremoni formal, tetapi juga mewakili nilai-nilai filosofis yang mendalam, memperkuat makna dan tujuan dari partisipasi Indonesia dalam Expo 2025 Osaka.

Maksud dari kegiatan ini untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan *Unveiling Design* Paviliun Indonesia sebagai suatu tindakan simbolis dalam proyek penyelenggaraan paviliun Indonesia pada kegiatan Ekspo Osaka 2025 secara tepat waktu, tertib, transparan dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah Menciptakan rangkaian kegiatan pelaksanaan *Unveiling Design* Paviliun Indonesia pada Expo 2025 di Osaka, Jepang yang terdiri atas rangkaian prosedur terkait persiapan, pelaksanaan serta pasca pelaksanaan sehingga memberikan gambaran terkait rangkaian acara yang akan dilaksanakan.

Pekerjaan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari s.d. 30 Maret 2024 lalu berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Nomor 151/SPK/06.20.03/LB/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum Kedua Kontrak Pelaksanaan Nomor 282/ADD/SPK/06.20.03/LB/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- 1) *Unveiling Design* Paviliun Indonesia;
- 2) *Handover Site* Paviliun Indonesia;
- 3) Rapat Koordinasi;
- 4) *Site Visit Yumeshima Island*;
- 5) Penandatanganan Lol dengan APO serta MoU dengan JAECA dan OHGI; dan
- 6) *Excursion*.

Total biaya pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 8.034.775.296,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran 100% (seratus persen).

- b. Pembangunan Paviliun Indonesia pada Expo 2025 di Osaka Tahap I

Esensi pembangunan paviliun pada *World Expo* adalah mempromosikan negara atau organisasi partisipan di dunia internasional. Pembangunan Paviliun juga memberikan panggung bagi mereka untuk melakukan ekspose terhadap identitas, keunggulan, serta potensi dari masing-masing negara. Secara khusus, pembangunan paviliun pada *Expo 2025* di Osaka didorong oleh beberapa faktor, antara lain untuk mempromosikan pariwisata, budaya, dan kemajuan inovasi teknologi bagi negara yang berpartisipasi dalam kegiatan *World Expo*. Paviliun menjadi wadah atraktif dan interaktif dalam menyelenggarakan berbagai macam kegiatan representatif dari setiap negara. Paviliun yang menarik dan informatif diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi pengunjung dan mitra internasional yang berkunjung ke negara yang menjadi bagian acara tersebut. Selain itu, paviliun juga menciptakan peluang untuk menjalin kerja sama di antara pemimpin, pengusaha, dan profesional dari berbagai negara. Maka dari itu, pembangunan paviliun

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pada kegiatan *Expo 2025* di Osaka menjadi wadah penting dalam merepresentasikan kekayaan alam, budaya, dan kemajuan pembangunan negara sehingga menjadi daya tarik investasi serta kerja sama bilateral.



Komposisi ruang pada Paviliun terdiri dari *welcoming area*, *zona nature*, *zona culture*, *zona future*, *main show cinema*, *relaxing area* (*restaurant*, *café*, dan *souvenir*), *VIP lounge*, dan kantor pengelola. Pada lantai 1, Suasana hutan tropis dituangkan dalam desain interior pada *welcoming area*. Selanjutnya, pada *Zona nature* akan ditampilkan *immersive video* dengan durasi 3-4 menit. Zona ini memiliki kapasitas sebesar 60 orang dengan pengemasan suasana ruangan berupa “*elevated room*” yang terbagi menjadi 3 level mulai dari penggambaran inti bumi hingga angkasa di Indonesia. Selanjutnya, *Relaxing area* yang terdiri dari *restaurant*, *café*, dan toko *souvenir* yang menampung kapasitas sebanyak 40-50 bangku. Di samping itu, terdapat *VIP Lounge* sebagai ruang penerimaan tamu VIP dan sebagian area bisa difungsikan sebagai tempat *one on one meeting*. Pada lantai 1 paviliun terdapat ruang yang berfungsi sebagai Kantor pengelola. Ruang ini terbagi atas ruang *commissioner general*, ruang *Paviliun manager* dan kesekretariatan, ruang *VIP Lounge*, *musholla*, *pantry* dan gudang.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Pada lantai 2 terdapat ruang *culture area*, yang merupakan area multimedia informatif yang didukung oleh LCD Monitor dan sistem audio. Selanjutnya pada zona *future* dirancang berlandaskan tema visi Indonesia 2045 dengan merepresentasikan maket IKN yang didukung dengan teknologi *mapping* pada maket dan dinding yang mengelilingi ruangan. Selanjutnya area *Main Show* berupa Cinema, yang merupakan ruang theater menggunakan layar besar dengan kapasitas 180-200 kursi yang dilengkapi dengan elevator sebagai fasilitas ramah disabilitas.

Maksud dari kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Paviliun Indonesia Pada Expo 2025 di Osaka Tahap 1 adalah terbangunnya *Venue* Bangunan Paviliun Indonesia Tahap 1 pada *Expo* 2025 di Osaka secara tepat waktu, efisien, efektif, tertib, transparan dan akuntabel. Sedangkan tujuannya adalah :

- 1) Mendukung dan mensukseskan partisipasi Pemerintah Indonesia pada kegiatan *Expo* 2025 di Osaka dengan terwujudnya *Venue* Bangunan Paviliun Indonesia Tahap 1 beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia dan Jepang, dan menjaga akuntabilitas dari pemanfaatan anggaran dengan cara yang efektif dan efisien, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan memenuhi persyaratan kualitas, biaya, dan waktu yang telah ditetapkan.

- 2) Memastikan pekerjaan konstruksi *Venue* Bangunan Paviliun Indonesia Tahap 1 sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara *Expo* 2025 di Osaka dan Pemerintah Jepang

Pekerjaan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei s.d. 24 Desember 2024 berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Nomor 023/SPK/06.20.03/LB/05/2024 tanggal 3 Mei 2024 dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan pembangunan/konstruksi;
- 2) Pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Pemeriksaan dan penilaian dokumen pelaksanaan konstruksi fisik;
- 4) Menyusun program kerja secara detail;
- 5) Melaksanakan penyusunan gambar pelaksanaan (*shop drawing*);
- 6) Melakukan *commissioning test*; dan
- 7) Melaksanakan pemeliharaan pekerjaan konstruksi pembangunan *venue* bangunan paviliun Indonesia tahap I.

Total biaya pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 366.734.633.635,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp, 73.346.926.727,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah) untuk pembayaran Uang Muka.

Pekerjaan ini akan dibayarkan dalam 3 (tiga) termin sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Termin I, akan dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai total pekerjaan dengan dikurangi biaya angsuran uang muka secara proposional atau sebesar Rp. 48.897.951.151,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh satu Rupiah) pada tanggal 26 Juli 2024 apabila Penyedia telah menyelesaikan *progress* pembangunan sebesar 20% (dua puluh persen).

- 2) Termin II, akan dibayarkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai total pekerjaan dengan dikurangi biaya angsuran uang muka secara proposional atau sebesar Rp. 103.908.146.196,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus delapan juta seratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam Rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2024 apabila Penyedia telah menyelesaikan *progress* pembangunan sebesar 55% (lima puluh lima persen).
 - 3) Termin III, akan dibayarkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari nilai total pekerjaan dengan dikurangi biaya angsuran uang muka secara proposional atau sebesar Rp. 140.581.609.561,00 (seratus empat puluh miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah) pada tanggal 20 Desember 2024 apabila Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan tahap I sesuai dengan rencana dan persetujuan Konsultan Pengawas.
- c. Pengelolaan Paviliun Indonesia : Pekerjaan Tahap I PR *Branding* pada Expo 2025 di Osaka
- Dalam konteks dukungan kegiatan bagi keikutsertaan Indonesia pada Expo 2025 Osaka maka diperlukan pekerjaan kegiatan PR *Branding*. kegiatan PR *Branding* yang terfokus dan terarah akan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa Expo 2025 Osaka menjadi panggung efektif bagi Indonesia untuk meraih dukungan, perhatian, dan pengakuan yang lebih luas di tingkat nasional maupun global. kegiatan PR *Branding* merupakan hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan, memperkuat kebanggaan dan memelihara citra positif bagi masyarakat luas terhadap dukungan keikutsertaan Indonesia pada Expo 2025 Osaka.
- Keikutsertaan Indonesia dalam Expo 2025 Osaka merupakan platform strategis untuk memproyeksikan identitas nasional dan potensi Indonesia di panggung global. Dalam rangka mengoptimalkan dampak partisipasi

ini, implementasi program PR *Branding* yang terarah dan terukur menjadi krusial. PR *Branding* berperan sebagai instrumen kunci dalam memastikan Expo 2025 Osaka menjadi katalisator bagi peningkatan visibilitas, reputasi, dan daya tarik Indonesia di mata dunia. Kegiatan pekerjaan PR *Branding* berfungsi sebagai sarana untuk membangun dan memperkuat citra positif Indonesia melalui diseminasi informasi yang akurat, relevan, dan menarik. Melalui kampanye PR *Branding* yang terintegrasi dan multi-platform, kesadaran publik baik di tingkat nasional maupun internasional terhadap partisipasi Indonesia di Expo 2025 Osaka dapat ditingkatkan secara signifikan.

PR *Branding* berperan dalam menggalang dukungan dan partisipasi aktif Kementerian, Lembaga, swasta hingga masyarakat dalam menyukseskan partisipasi Indonesia di Expo 2025 Osaka, baik melalui media sosial, kegiatan komunitas, maupun inisiatif lainnya. PR *Branding* berfokus pada pengembangan narasi positif yang komprehensif dan kohesif mengenai Indonesia, mencakup aspek budaya, ekonomi, sosial, dan lingkungan, untuk menarik minat dan investasi dari berbagai pemangku kepentingan global.

Maksud dari kegiatan pelaksanaan PR Branding tahap I (satu) adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan citra positif Indonesia, *awareness* publik, menarik minat pengunjung publik dan pihak terkait pada Paviliun Indonesia
- 2) Meningkatkan daya tarik investor dan kerjasama dalam rangka partisipasi Indonesia pada World Expo 2025 Osaka.
- 3) Pelaksanaan kegiatan PR Branding ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan kaidah ketentuan pekerjaan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip-prinsip ketepatan waktu, ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas.

Tujuan kegiatan dari paket pekerjaan PR *Branding* tahap I antara lain tersedianya dukungan penyelenggaraan dalam:

- 1) Meningkatkan *awareness* partisipasi Indonesia dalam World Expo 2025 di Osaka.

- 2) Mengoptimalkan visibilitas Indonesia di kancah nasional dan internasional melalui peningkatan kesadaran publik terhadap partisipasi Indonesia pada Expo 2025 Osaka.
- 3) Membangun dan membentuk citra positif Indonesia sebagai negara kaya, inovatif, ramah tamah, dan memiliki peluang investasi yang menarik melalui publikasi informasi yang kredibel dan menarik.
- 4) Meningkatkan *traffic (traffic acquisition)*: Menarik pengunjung ke Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka dengan menerapkan strategi komunikasi yang persuasif dan mengundang partisipasi publik.
- 5) Membuka peluang kemitraan dalam berpartisipasi dalam mengisi Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 Osaka
- 6) Meningkatkan dan Memperkuat Nation branding para pemerintah dan sektor swasta, sehingga muncul inisiatif dan partisipasi aktif mendukung Indonesia.
- 7) Mengajak para KL dan private sektor untuk mengisi pavilion Indonesia.

Pekerjaan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni s.d. 30 September 2024 berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Nomor 201/SPK/06.20.03/LB/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Strategi komunikasi dan pengembangan *website*;
- 2) Publikasi *event program*;
- 3) Penguatan *National Branding*; dan
- 4) Meningkatkan *awareness*.

Total biaya pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 6.007.058.040,00 (enam miliar tujuh juta lima puluh delapan ribu empat puluh Rupiah) dengan rencana pembayaran sekaligus yang akan dilakukan pada tanggal 30 September 2024.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d. Pekerjaan Tahap I Konten, Audio Visual (Multimedia) dan *Shipping*

Pekerjaan ini masih dalam tahap persiapan dengan rencana berkontrak untuk pekerjaan Tahap I Konten dan Audio Visual dalam rentang waktu triwulan III sedangkan *shipping* dalam rentang waktu triwulan IV.

Jakarta, Juli 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional

Suharso Monoarfa

LAPORAN KEUANGAN *UNAUDITED*
BAGIAN ANGGARAN 055
SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian PPN/Bappenas
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310

